

**GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI
(1998 – 2005)**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu-Ilmu Syari'ah**



Oleh:

HENDRA SUHENDRA
NIM: 012211322

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2007

NOTA PEMBIMBING

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas
Syari'ah
IAIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah Saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya, bersama ini
Saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hendra Suhendra
NIM : 012211322
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Gerakan Politik ICMI dalam Politik Islam pada Era Reformasi 1998-2005**

Dengan ini Saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum, dan atas perhatiannya diucapkan
terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 Januari
2007
Pembimbing,

*Dr. Imam
Yahya, M.Ag.*
NIP. 150 275 331

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Hendra Suhendra
NIM : 012211322
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : **Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal :

31 Januari 2007

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2007/ 2008

2007

Semarang, 31 Januari

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A.
Ag.
NIP: 150 028 292

Dr. Imam Yahya, M.
NIP. 150 275 331

Penguji I,

Penguji II,

Drs. Muhammad Solek, M.A.
M.Ag.
NIP: 150 262 648

Drs. H. Nur Khoirin,
NIP: 150 254 254

Pembimbing,

Dr. Imam Yahya, M. Ag.
NIP. 150 275 331

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

(الْحُجُرَاتُ : 10)

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.”
(QS. Al Hujurat 49: 10)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Jumanatul 'Ali Art, 2005, hlm. 516

PERSEMBAHAN

Dengan segala kebahagiaan serta kerendahan hati, penulis persembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Ibunda dan Ayahanda yang telah membesarkan dan membantu kesuksesan ananda
2. Saudara-saudara penulis yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi ini
3. Ustadz dan ustadzahku dari kecil yang telah memberikan ilmunya kepada penulis hingga sekarang
4. Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa “Walisongo” sebagai tempat belajar penulis disamping di bangku kuliah
6. Semua rekan-rekan yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2007

Deklarator,

Hendra Suhendra
NIM: 012211322

ABSTRAKSI

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Mengapa pemerintah Orde Baru (waktu itu) mencibir dan meminggirkan kaum Islam? Selanjutnya bagaimana Peran ICMI Pra-Reformasi (1990-1998)? Dan bagaimana Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005) ? Hal ini merupakan ‘teka-teki’ menarik yang masih menjadi ‘tanda tanya’, karena belum banyak diketahui oleh publik (masyarakat awam) secara komprehensif.

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu berusaha Untuk mengetahui Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005) dalam memberikan pesan moral dan etika politik kepada elite politik. Oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menuliskan, mereduksi dan menyajikan data serta menganalisis. Data diambil dari berbagai sumber tertulis yaitu berupa buku-buku. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Dokumentasi, Wawancara (*interview*),

Dari hasil penelitian tersebut, dapat di ketahui Latar belakang pembentukan ICMI dikarenakan umat Islam, khususnya cendekiawannya, merasa dipinggirkan dalam wacana nasional. Syiar Islam pun dihambat. Rangkaian peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, fitnah ihwal komando jihad mendahului pembentukan Organisasi Cendekiawan Muslim ini. "Sebelum ICMI ambil bagian secara wajar dalam wacana nasional, anak sekolah wanita dilarang mengenakan busana Muslim. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah. Dulu, bagi mubaligh untuk berkhotbah pun harus memiliki surat izin mubaligh (SIM) dari kopkamtib. ICMI lahir dengan tujuan membangun bangsa yang bermartabat dan mandiri.

Di era reformasi, terutama setelah adanya kebebasan politik Islam mengalami kebangkitan. Ada perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru, yang mulai mengakomodasikan aspirasi Islam. Naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga menggantikan Soeharto, membuat ICMI semakin dekat dengan kekuasaan dan menjadikan ICMI mempunyai kekuatan politik yang besar dan menentukan.

Keberadaan ICMI tidak bisa disangkal ikut memainkan peran politik umat Islam. Akan tetapi di era reformasi ini peran itu makin menyurut, karena sudah banyak partai Islam yang tampil memperjuangkan kepentingan umat Islam. ICMI di era reformasi sekarang ini adalah sebagai perekat internal umat Islam Indonesia. ICMI sebaiknya tetap tampil sebagai gerakan kultural dengan tidak meninggalkan wacana politik. Ini tidak berarti bahwa ICMI lantasi-politik, tetapi politik yang dikembangkannya adalah politik alokatif. Melalui peran seperti itu, ICMI diharapkan akan mampu mewujudkan integrasi politik dan sosial kultural antara ummat Islam dan negara.

KATA PENGANTAR

Sujud Syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Illahi Robbi*, yang telah menciptakan segala sesuatu dengan penuh keteraturan agar dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh makhluk-Nya untuk mengatur dan *me-manage* berbagai kegiatan yang akan mereka lakukan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat serta seluruh umatnya.

Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan baik, walaupun banyak halangan dan rintangan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya khususnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Abdul Djamil, MA., Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Drs. H. Muhyidin, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang
3. Dr. Imam Yahya, M.Ag. Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu semata-mata untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan hingga terselesaiannya skripsi ini.
4. Bapak Munti M. Nur dan Ibunda tercinta Nanih, *nuhun* atas bimbingan, support, ‘ultimatum’ dan kasih sayangnya.
5. Ustadz-uztadzku dari kecil hingga sekarang terimakasih ananda sampaikan karena telah membekali ilmu untuk menjalani roda kehidupan, hingga ananda dapat selesai dari jenjang pendidikan strata satu.
6. Kakakku Idi Wahidin, S.Psi dan Adikku Lukman Nur Hakim, Ikhsan Jaelani, Teh Anis Khoirunnisa, S.Pt (Ipar), terimakasih atas bantuan dan motifasinya, Zahwa + Azka (Keponakan) yang lucu, manis, imut dan membuat kangen.
7. H. Abu Hafsin, M.A. Ph.D beserta keluarga yang telah memberikan motivasi, spirit, support sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsinya.
8. Dr. Adi Sasono (Mantan Ketua Umum ICMI Pusat) yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara di dalam mobil sedan great sepanjang perjalanan dari kampus III IAIN Walisongo sampai Bandara Ahmad Yani Semarang.

9. Suharmono, S.E., M.Si (Sekertaris ICMI Orwil Jawa Tengah) beserta jajaran pengurus, yang telah membantu memberikan data dan dokument dalam penelitian sehingga skripsi ini bisa sempurna.
10. Seluruh penulis buku yang dijadikan referensi, terimakasih semuanya, semoga amal tersebut menjadikan tambahnya iman dan taqwa kepada Allah SWT.
11. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa IAIN Walisongo, Pengawas, Pengurus, Kader, Karyawan dan Anggota, yang selalu mengajari penulis untuk tetap berfikir maju dan tetap semangat “Bravo Kopma-Ws”
12. Sahabat seperjuangan Amin ‘Ahmed’ fauzi, Lukman ‘Ayie’ Arifin, Rohmanto ‘Uda Anto’ as-shitiung, Abdulloh ‘Dede’ Aziz, Moch. ‘Om Jay’ Mujayin, Faris, Durroh ‘Neng” Intihaiyyah, Soniawati, Mutiara ‘Tia” Nurulilta, Eva Fariah, Sueni ‘Eni’, yang tak pernah akan penulis lupakan kebaikan selama hidup dalam kebersamaan. Kawanku Wahyu ‘Tasik’, *nuhun komputer na tos diangge kanggo ngadameul* skripsi.
13. Sahabat terkasihku Nur ‘D’ Halimah yang telah bersedia menjadi ‘tabib’ ketika penulis membutuhkan motivasi, spirit, support untuk menyelesaikan skripsi dan masa depan. Beserta teman se-kostnya Arifah, Mut ‘Imut’ dan ‘Zoom’ Zumrotun,
14. Tak terlupakan kawan-kawan KKN beserta keluarga Pak Dahlan Lurah Desa Wonodadi-Bandar-Batang serta paket Siyasa Jinayah (SJ).

Kepada mereka semua, tiada yang dapat penulis perbuat untuk membalas, kecuali penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya serta doa penulis semoga amal perbuatan mereka dibalas Allah, dengan balasan yang berlipat ganda. *Amien ya Robbal Alamin....*

Akhirnya kepada Allah SWT, penulis memohon petunjuk dan berserah diri serta memohon ampunan dan perlindungan-Nya *Amien.....*

Semarang, Januari 2007

Hendra Suhendra
NIM: 012211322

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Nota Pembimbing	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan.....	v
Deklarasi	vi
Abstraksi	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan Skripsi	12
D. Defenisi Operasional.....	12
E. Telaah Pustaka	14
F. Metode Penelitian	16
G. Sitematika Penulisan	19
BAB II : ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA	21
A. Islam dan Politik pada Masa Orde Lama (1945 – 1966)	23
B. Islam dan Politik pada Masa Orde Baru (1966 – 1998).....	28
C. Islam dan Politik pada Era Reformasi (1998 – 2005)	34
BAB III : GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI (1998 – 2005)	45
A. Selayang Pandang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).....	46
B. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam Dinamika Politik Islam.....	54

C. Gerakan Politik Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Era Reformasi (1998 – 2005).....	60
BAB IV : ANALISIS GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI (1998 – 2005)	65
A. Peran ICMI dalam Dinamika Politik Islam Pra-Reformasi.....	65
B. Gerakan Politik ICMI dalam Politik Islam pada Era Reformasi	73
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85
Daftar Pustaka	87
Lampiran-Lampiran	
Daftar Riwayat Hidup Penulis	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah Islam Indonesia terdapat polarisasi umat Islam yang amat kaya. Sejak masuknya Islam ke Indonesia¹ sampai zaman pra-kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajahnya yang beraneka ragam, yang dipresentasikan oleh organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi politik (orpol). Oleh para pengamat Islam, keanekaragaman ini diidentifikasi dengan memakai berbagai nama atau label. Ada Islam tradisional², Islam modernis³, Islam Puritan/Fundamental⁴, dan lain sebagainya.

Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh kelompok muslim Indonesia semula tumbuh akibat pengaruh gerakan pemurnian teologi keagamaan

¹ Para sejarawan dalam seminar *Sejarah Masuknya Islam Ke Indonesia*, yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 M dan dikuatkan dengan seminar yang sama di Banda Aceh pada tahun 1978, sepakat bahwa ajaran Islam masuk ke Indonesia pada abad VII dibawa langsung dari Mekah-Arab Saudi. Seminar tersebut tiga butir kesepakatan, yaitu (1) Ajaran Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad I Hijriah atau abad VII Masehi. (2) Ajaran Islam masuk ke Indonesia tidak melalui India, tetapi langsung dari Mekah-Arab Saudi. (3) Madzhab Syafi'i adalah madzhab yang mewarnai Islam di Indonesia. Hasil seminar tersebut dengan tegas membantah pendapat yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad VIII oleh pedagang Gujarat dari India. Materi dasar Nahdlatul Ulama Ahlul-sunnah Waljamaah; *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, Semarang: PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002, hlm. 33

² Istilah tradisonalisme Islam ini dekat sekali dengan tokoh Islam asal Iran, Seyyed Hossein Nasr, menurutnya adalah Islam yang berpegang pada "tradisi" yang suci, murni dan abadi. Pendukung Islam taradional adalah orang yang menerima al-Qur'an sebagai wahyu Tuhan baik dalam isi maupun bentuk sebagai jantung pewahyuan Islam. Drs. Muhammad Azhar, M.A, *Filsafat Politik; Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997, hlm 167.

³ Islam modernis adalah Islam yang sedang melakukan justifikasi dan penyesuaian teologis (*islah*) terhadap fakta-fakta kemodernan. Visi modernisme dalam Islam adalah bagaimana seseorang melakukan rekonsiliasi teologis (*islah*) terhadap realitas modern. Swara Ditperta: No. 14 Th. II, 31 Agustus 2004

⁴ Fundamentalisme Islam tampak diwakili oleh gerakan Wahabi (Saudi Arabia), Jamaat Islami (Pakistan), al-Ikhwan al-Muslimin (Mesir) dan gerakan-gerakan yang mengadakan beberapa konferensi Islam internasional yang berpusat di Saudi Arabia, Pakistan juga di Eropa, yang tujuannya adalah untuk memepersatukan dunia Islam. Gerakan ini lebih berorientasi kepada gerakan neo wahabi, puritan atau fundamentalis. *Ibid*, hlm 168-169

Wahabiyah, dan gerakan pembaharuan perjuangan politik Jalaludin al-Afghani, dengan pan-islamisme-nya, dalam rangka mempersatukan umat Islam di dunia. Gerakan pembaharuan bukan saja bertujuan memurnikan ajaran Islam, tetapi sekalaigus mendorong umat Islam untuk menerima pandangan dunia modern dan tantangan yang timbul dari penemua-penemuan ilmu Barat. Pada umumnya, gerakan pembaharuan dapat dibagi dua bagian, yaitu gerakan pendidikan dan sosial, serta gerakan politik.

Satu-satunya organisasi modern pada tahun 1900-an yang bergerak dibidang politik adalah Syarikat Islam (SI).⁵ Bahwa SI merupakan organisasi politik nasional yang pertama, dan menyerukan kemerdekaan Indonesia, serta merupakan pusat kebangkitan nasional Indonesia. Namun sangat disayangkan, posisi SI yang tengah menjulang tidak dapat dipertahankan sebagai katalisator pergerakan nasional yang mulai memudar dipenghujung tahun 1920-an. Merosotnya peran SI disebabkan oleh bebrapa faktor, diantaranya yang paling penting adalah ketidakmampuan para pemimpin untuk mengatasi berbagai perbedaan paham diantara mereka/ anggota, khususnya berkaitan dengan arah politik SI.

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, setelah pasukan Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Hal tersebut merupakan

⁵ Syarikat Islam (SI) Bermula dari sebuah organisasi dagang, yang bernama Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan pada tahun 1905, kemudian berganti nama menjadi Syarikat Islam (SI) yang didirikan oleh H. Saman Hoedi, di Solo (Surakarta) pada tahun 1905. SI berkembang pesat menjadi organisasi politik nasional pertama di Indonesia, dibawah kepemimpinan HOS Cokro Aminoto, KH. Agus Salim, dan Abdul Moeis. SI adalah organisasi pemuda yang mengembangkan program politik untuk menuntut pemerintahan sendiri dan kemerdekaan penuh. Bachtiar Efendi, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prospek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998, hlm. 63

awal dari babak baru lembaran bangsa Indonesia dalam pemerintahan Orde Lama. Proklamasi Kemerdekaan memberikan “angin segar” kebebasan kepada berbagai aliran politik di Indonesia untuk membentuk parta-partai politik sebagai wahana demokrasi. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh umat Islam.

Pada tanggal 7-8 Nopember 1945 diadakan kongres umat Islam di Yogyakarta dengan nama Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi). Pada pembentukannya, Masyumi merupakan wadah bagi kekuatan politik Islam yang dapat digunakan untuk bernaung menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi umat Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia. Dalam kongres tersebut melahirkan dua keputusan, pertama pembentukan sebuah partai dengan nama Masyumi. Kedua, umat Islam telah memiliki partai politik.

Sejak itu Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bermuatan otoriter dan diktator. Sistem Orde Lama yang cenderung diktator inilah yang membuat banyak orang tidak senang terhadap kepemimpinan Soekarno, hingga memicu lahirnya gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G 30 S-PKI) tahun 1965. Gerakan ini mencatat lembaran hitam dalam sejarah bangsa Indonesia. Hingga terbunuhnya enam Jenderal sekaligus ditangan pemberontak dalam kondisi yang sangat memperihatinkan. Sejak itu Orde Lama berakhir dan muncul Orde Baru dibawah pimpinan garis komando Jenderal Soeharto.⁶

Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966, merupakan gerbang awal pemerintahan Orde Baru sebagai landasan formal

⁶ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I; Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2001, hlm. 207

dibawah garis komando Jenderal Soeharto. Politik Islam Orde Baru mengalami dinamika yang berbeda selama tiga dekade. Gerakan Islam yang beraneka warna ini mengalami peningkatan kegairahan, pada akhir dekade tahun 1980-an, fenomena ini tidak lepas dari perubahan kebijakan politik rezim Soeharto terhadap gerakan Islam. Pada masa sebelumnya, pemerintah Orde Baru tampak sekali mempersempit ruang gerak ormas-ormas Islam.

Memang, sejak tahun 1959 sampai sekarang bangsa Indonesia menerima pemasangan politik yang menyebabkan inisiatif politik yang segar dan kreatif tidak dapat muncul diatas permukaan. Baik politik Orde Lama maupun Orde Baru didasarkan pada otoritarisme dan pelecehan terhadap hak-hak azasi manusia rakyat Indonesia, sehingga hak-hak demokrasi mereka itu dibenamkan di dalam proses pembodohan bangsa yang tidak putus-putusnya.⁷

Berdasarkan pengalaman pahit di masa Orde Lama itu (hidup dalam multi partai, maka Presiden Soeharto dengan sistem Demokrasi Pancasila-nya memangkas habis parpol yang banyak itu, sehingga hanya boleh hidup tiga saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga parpol tersebut harus mempunyai asas yang sama yakni Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal.⁸ Pemerintah Orde Baru mengambil langkah tersebut guna menstabilkan politik dengan cara menyederhanakan partai-partai politik menjadi tiga kontestan.

Trikotomi baru muncul dengan tiga partai sebagai wadah. PPP “mewakili” santri, PDI “mewakili” kaum nasionalis dan non muslim yang

⁷ M. Amin Rais, *Sikap Kami*, Surabaya: Pustaka Anda, Cet. I, 1999, hlm. 88

⁸ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Ibid*, hlm. 208

“*abangan*”, Golkar “mewakili” kaum priyai.⁹ Kondisi ini pula yang kemudian menjadi bumerang terhadap pemerintahan Soeharto, yakni dianggap merampas hak asasi rakyat dengan melarang mereka mendirikan parpol. Dari gambaran itu, praktek sistem Demokrasi Pancasila ala Soeharto tersebut tidak jauh berbeda dari sistem Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, yakni sama-sama diktator dan menekan rakyat sehingga mereka tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah.

Kelompok-kelompok Islam yang masih kukuh dengan ideologi Islam politiknya, dipandang sebagai ancaman terhadap kamapanan kekuasaan Orde Baru yang ditopang oleh militer, birokrasi dan Golkar. Namun, ketika pendekatan oposisional-simbolistik kalangan Islam digantikan dengan pendekatan yang lebih akomodatif, tak ada alasan lagi bagi pemerintah meminggirkan kalangan Islam.¹⁰

Rezim Orde Baru memerankan panggung politiknya sendiri, yaitu : peminggiran politik Islam dan akomodasi politik Islam. Sejak dekade tahun 1990-an, berbagai unsur Islam memperoleh peluang yang semakin luas dalam ruang-ruang negara. Pergeseran posisi Islam yang semakin ketengah dalam panggung politik ini sering disebut “politik akomodasi Islam”, yang terdiri dari akomodasi struktural,¹¹ akomodasi infrastruktural,¹² akomodasi kultural,¹³ dan akomodasi legislatif.¹⁴

9 Thorik Solikul Karim, *Polarisasi dan Politik Islam Indonesia* (Artikel), Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 107/ Juni-Agustus 2006, hlm. 20

¹⁰ M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 131

¹¹ Direkrutnya para pemikir dan aktivis islam untuk menduduki posisi-posisi penting dalam birokrasi Negara maupun badan-badan legislatif. M. Imdadun Rahmat, *Ibid*, hlm 131

Seiring dengan kebangkitan Islam (*the revivalisme islam*), maka berbagai persoalan yang berhubungan dengan hakikat, karakteristik serta ruang lingkup suatu negara Islam dan sistem politik Islam, mendapat sorotan tajam. Namun kajian politik Islam lebih banyak berbicara tentang peristiwa-peristiwa politik mutakhir didunia Islam kontemporer, tanpa ada upaya untuk mengkaji secara lebih mendalam aspek-aspek teori politik¹⁵ yang benar-benar dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa tersebut.

Berdasarkan kenyataan diatas pula, upaya pemulihan pengkajian politik Islam merupakan kebutuhan yang mendesak. Alangkah janggalnya, umat islam yang mayoritas (terutama) disebuah negara Islam menjadi umat yang buta politik terutama secara teoritis. Hal ini menjadi lebih penting lagi bila dikaitkan dengan fenomena kebangkitan Islam dewasa ini, dan seiring dengan munculnya desa buana (*global-village*) akibat globalisasi yang tidak memungkinkan lagi bagi negara-negara Islam untuk bersikap isolatif, bagaikan burung onta dipadang pasir.¹⁶

Perkembangan modernitas yang begitu dahsyat perlu diimbangi dengan saratnya dimensi nilai etika Islami yang sudah tentu membutuhkan para pakar

¹² Penyediaan dan bantuan infrastruktur bagi kepentingan umat islam dalam menjalankan kewajiban agama meraka. Seperti pembangunan masjid yang disponsori oleh Negara. *Ibid*, hlm 131

¹³ Diterimanya ekspresi cultural islam kedalam wilayah public, seperti pemakaian jilbab, baju koko, hingga ucapan *assalamu'alaikum*. *Ibid*, hlm 131

¹⁴ Upaya memasukan beberapa aspek hukum Islam menjadi hukum Negara, meskipun hanya berlaku bagi kalangan umat islam saja. *Ibid*, hlm 131

¹⁵ Arti politik bisa sedemikian beragam, tergantung pada arah yang ingin dijelaskan. Dalam arti umum, politik bisa diartikan sebagai siasah, strategi, atau seni bagaimana mencapai sesuatu yang diinginkan. Berpolitik berarti melakukan serangkaian perencanaan dan aktivitas guna memperoleh kekuasaan yang diinginkan. Karena berpolitik pada dasarnya ialah mengatur dan menata kehidupan dalam skala Negara, pemerintahan dan masyarakat guna memperbaiki kehidupan bersama. *Majalah Ma'arif*, Edisi 09/ IV/ Desember 2004-Maret 2005, hal 23-24

¹⁶ Drs. Muhammad Azhar, M.A, *Op.Cit*, hlm. 5

Islam yang mampu mengalokasikan nilai-nilai keislaman tersebut. Dengan eksisnya lembaga pendidikan atau penelitian dibidang politik Islam akan dapat melahirkan pendekatan baru yang tidak sekedar legal-formal seperti fiqh *ansich*. Ilmu politik banyak berbicara tentang teori-teori social yang lebih empirik, tidak sekedar normatif.¹⁷

Demikian pula dengan gerakan Islam yang dimotori dan didukung oleh komunitas muslim santri ini juga tidak tunggal. Di dalamnya terdapat berbagai kelompok dengan pemikiran, ideologi, dan strategi gerakan yang bermacam-macam. Namun, dalam keanekaragaman ini terdapat satu corak gerakan keagamaan *mainstream* yang diwakili oleh Nahdlatul ulama (NU), Muhammadiyah, Jamiat Khair, Al-Irsyad, Al-Wasliyah, dan sebagainya.

Nahdlatul ulama (NU), Jamiat Khair, Al-Wasliyah oleh banyak kalangan sering diidentikan dengan Islam tradisional, sementara Muhammadiyah dan Al-Irsyad diidentikan dengan Islam modernis. Corak keagamaan yang dominan ini juga tidak monolitik dan seragam, sering kali ditengarai dengan watak moderat, pluralis dan inklusif dalam berbagai kadar yang berbeda. Semenjak merdeka, kelompok- kelompok ini menjadi warna dominan hingga kini.

Kebangkitan keislaman ini kemudian menjadi pra-kondisi bagi munculnya berbagai kelompok gerakan Islam yang baru (*New Islamic Movement*). Momentum penting datang ketika Orde Baru jatuh dari kekuasaannya. Perlakuan serupa itulah yang kemudian melahirkan gerakan reformasi, dan berhasil menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan pada

¹⁷ Drs. Muhammad Azhar, M.A, *Ibid*, hlm. 5

tanggal 21 Mei 1998, lalu digantikan oleh pemerintah Orde Reformasi dibawah Pimpinan Prof. B.J. Habibie. Tersumbatnya aspirasi politik rakyat selama tiga dasawarsa, sehingga zaman reformasi ini rakyat ingin kembali merebut hak-hak politik yang telah dirampas selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, sehingga menghasilkan banyak parpol dan ormas sebagai bentuk pelampiasan dari perasaan tertekan yang demikian lama.¹⁸

Dalam atmosfer kebebasan, bermunculan aktor gerakan Islam baru, yaitu diantaranya organisasi-organisasi tarbiyah (yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) merupakan representasi gerakan Islam baru di Indonesia.

Bersama bergulirnya reformasi, kelompok-kelompok revivalis Islam ini menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai Islam). Dua gerakan Islam ini memiliki peluang yang luas ketika rezim yang berkuasa memberikan angin kebebasan setelah lama dipinggirkan secara politik oleh rezim Orde baru. Gerakan baru yang disebut “intelektual baru Islam” menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif.

Gerakan Islam yang inklusif ini berhasil membuat hubungan yang harmonis dengan rezim Orde Baru yang ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain Surat Keputusan Dirjend Pendidikan dasar dan Menengah P&K tentang diizinkannya

¹⁸ Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Op.Cit*, hlm. 208

pemakaian jilbab bagi pelajar putri, dalam kancah politik juaga akomodasi Islam ini melahirkan fenomena “*ijo royo-royo/ penghijauan*” di parlemen atau birokrasi, berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1990.¹⁹ Mengingat dalam era tahun 1990-an kelompok cendekiawan muslim memperoleh posisi dan kedudukan “terhormat” dalam budaya politik dihadapan kekuasaan.

Menurut Louis Garzia, seorang pemikir asal meksiko mengatakan, tak ada suatu pemerintah dan sistem politik di dunia ini yang tidak membutuhkan dukungan cendekiawan. Akan tetapi, itu hanya dilakukan saat kebijaksanaan politiknya membutuhkan pembenaran dan legitimasi normatif.²⁰

Namun dalam perkembangannya, poteret atau profil memang telah memiliki pergeseran makna. Cendekiawan dalam perkembangannya bisa dilembagakan, Cendekiawan bisa berpolitik, Cendekiawan bisa berkelompok. Posisi Cendekiawan pada akhirnya sudah multi fungsi dan pergeseran peran, mereka sering disebut “tangan panjang” dari kekuasaan.²¹

ICMI sebagai organisasi kemasyarakatan yang bercirikan kebudayaan sebagaimana yang terumuskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), secara tegas menyatakan bahwa organisasi ini tidak mempunyai tujuan politik. Berdirinya ICMI tidak dilatarbelakangi oleh politik, melainkan didorong oleh kesadaran budaya kaum cendekiawan muslim untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan bangsa. Meskipun sudah

19 M. Imdadun Rahmat, *Op. Cit*, hlm. 133

20 Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik; Amin Rais Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998, hlm.65

21 Ahmad Bahar, *Ibid*, hlm. 68

dinobatkan sebagai gerakan sosial-kebudayaan, tetapi lebih sering dilahat dengan kaca mata politik.

Hal ini disebabkan karena banyak kader-kader ICMI yang terlibat kegiatan politik praktis. Walaupun dalam melakukan aktivitas politiknya tidak membawa dan mengenakan “baju” organisasi atau tidak secara langsung, tetapi oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “sepak terjang dan *track-record*” politik ICMI. Anggapan-anggapan ini semakin terlihat pada figur Ketua Umum ICMI Prof. Bachrudin Jusuf Habibie sebagai motor penggerak kegiatan ICMI. Sehingga langkah yang diayunkannya selalu membawa dampak kepada ICMI, atau setidaknya nama ICMI selalu terbawa.²² Misalnya, berhasil memasukan kader-kader ICMI dalam DPR/ MPR, kabinet (Adi Sasono sebagai sekretaris ICMI diangkat menjadi Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah) dan kepengurusan Golkar. Yang oleh para pengamat politik dinilai sebagai *peng-ijoyoyo-an* dari senayan hingga kabinet reformasi.

Menurut William R. Liddle, seorang pakar ilmu politik kenamaan sekaligus Guru Besar asal Ohio State University Amerika Serikat, di tubuh ICMI terdapat unsur primordial didalamnya yang berasal dari kaum yang sama. Hampir semua orang yang bergabung di dalam ICMI berasal dari tradisi tersebut.²³

Hal ini merupakan ‘teka-teki’ menarik yang masih menjadi ‘tanda tanya’, karena belum banyak diketahui oleh publik (masyarakat awam) secara

22 A. Makka Makmur Dharorudin Mashad, *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996, hlm. 61

23 M. Amin Rais, *Sikap Kami*, hlm. 194-195, Dalam arti ini, ICMI jelas tidak eksklusif tetapi inklusif primordialisme. Nah, disini ICMI memang primordial dalam arti agama Islam menyuruh para pemeluknya untuk bekerja keras, membuat prestasi, mengejar *achievement* (pencapaian) demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Ahmad Bahar, *Ibid*, hlm. 77

komprehensif. Maka dari itu penelitian ini akan berusaha melakukan penilaian secara objektif terhadap realitas politik kaum cendekiawan, sebagai sumbangsih terhadap upaya perumusan ulang atas gerak langkah dan sikap politik cendekiawan muslim ke depan, supaya benar-benar menjadi pejuang umat yang sejati, tanpa terkontaminasi oleh “kepentingan sempit dan sesaat”. Karena itu, penulis berinisiatif untuk mengangkat ‘teka-teki’ politik kaum cendekiawan muslim dan Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005), sebagai tema sentral dalam penulisan skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang gerak langkah, sikap politik kaum cendekiawan muslim, dan Gerakan Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam pada Era Reformasi (1998-2005). Agar permasalahan tidak melebar, maka kajian hanya untuk mencari jawaban atas pertanyaan :

1. Apa peran dan kontribusi ICMI dalam melaksanakan program kerja untuk kemaslahatan ummat ?
2. Bagaimana Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005) dalam memberikan pesan moral dan etika politik kepada elite politik dalam penyusunan kebijakan publik?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Berdasar pada dasar-dasar persoalan yang telah terdiskripsikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program kerja ICMI dalam peran dan kontribusinya guna kemaslahatan ummat.
2. Untuk mengetahui Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005) dalam memberikan pesan moral dan etika politik kepada elite politik.

D. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari salah interpretasi terhadap beberapa istilah yang secara operasional digunakan dalam kajian ini, maka penulis mendefinisikan satu persatu pengertian dari istilah yang ada berikut ini. Sehingga penulis dapat menyatukan persepsi satu sama lain tanpa terjadi ambivalensi dan ambiguitas yang berarti. Adapun makna istilah tersebut berikut ini adalah :

1. **Gerakan** : Perbuatan atau keadaan bergerak ; tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan.²⁴
2. **Politik** : Asal kata ini dari bahasa Inggris, yakni *politic*. Yang artinya adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan dan lain

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002. hlm. 356

sebagainya. Bisa juga diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan dan siasat).²⁵

- 3. ICMI** : Adalah singkatan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia. Sebuah organisasi yang merupakan wadah dialog intelektual bagi para cendekiawan muslim Indonesia yang mempunyai komitmen pada nilai-nilai keislaman tanpa melihat aliran warna politik dari kelompok mereka. Organisasi ICMI didirikan pada tanggal 7 Desember 1990 di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur.²⁶
- 4. Pada** : Kata depan yang dipakai unyuk menunjukkan posisi di atas atau didalam hubungan dengan, searti dengan di (pakai di depan, kata benda, kata ganti orang, keterangan waktu).²⁷
- 5. Era** : Kurun waktu dalam sejarah, sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah ; masa.²⁸
Atau suatu periode dalam sejarah.²⁹

²⁵ *Ibid*, hlm. 886. Sementara makna politik dalam kajian Barat diambil dari bahasa Yunani *Politikos* atau bahasa latin *Politica*, dimana mempunyai kata dasar polis. Atau kajian tentang pemerintahan dan lembaga-lembaga secara proses politik disebut ilmu politik atau politikologi. Hal ini telah dikenal oleh umat manusia sejak zaman plato dengan gagasan “Republik”-nya, dan dilanjutkan oleh Aristoteles dengan sebutan “politik”, kemudian berkembang terus sampai pada teori-teori politi tekenal seperti teori Michievelli, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu, Bentham, Rousseau dan Karl Marx.. Pada umumnya, kajian yang mereka lakukan berkenaan dengan sifat Negara, kedaulatan, dan pemerintahan. Namun, dewasa ini studi tersebut lebih ditekankan pada perhimpunan masyarakat, watak kelompok-kelompok kepentingan dan proses pengambil keputusan. Lihat, Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Loc. Cit*, hlm. 195

Filosof Yunani laiknya Plato telah menulis karya politiknya dalam buku *Politea*, sedangkan muridnya, Aristoteles menulisnya dalam judul *Politica*. Dasar kajian karya tersbeut terfokus pada problematika tentang pengaturan dan pengorganisasian manusia per personal, masyarakat, hingga negara. Lihat juga, Ahmad Khoirul Umam, “Korupsi dalam Spektrum Politik Kiai; Studi Kasus Nahdlotul Ulama di Jawa Tengah”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2005, hlm. 15, td.

²⁶ Ensiklopedi Islam, Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993, hlm. 186

²⁷ *Ibid*, hlm. 807

6. Reformasi : Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.³⁰ Atau perubahan untuk memperbaiki masalah-masalah sosial, politik atau agama yang terjadi dalam suatu masyarakat atau negara.³¹

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penulisan skripsi ini meliputi dua hal, pertama, berkaitan dengan pandangan kaum cendekiawan muslim tentang politik Islam di Indonesia. Kedua, adalah seberapa besar pengaruh ICMI terhadap gerakan politik Islam pada Era Reformasi (1998-2005), dalam upaya peningkatan pembangunan bangsa. Sebagaimana yang telah disinggung di awal pada bab pendahuluan, bahwa kelahiran dan keberadaan ICMI menjadi fenomena tersendiri dalam belantika politik Islam di Indonesia. Sehingga menjadi daya tarik para pengamat untuk meneliti tentang eksistensi ICMI beserta pengaruhnya. Telah banyak buku yang mengupas tentang kedua persoalan tersebut meski secara terpisah.

Adapun buku tersebut antara lain ditulis oleh Ahmad Bahar, *Biografi Cendekiawan Politik; Amin Rais Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru* (1998). Buku ini mendiskripsikan perkembangan, potret dan profile kaum cendekiawan (Amin Rais) yang dinilai telah mengalami pergeseran makna. Cendekiawan dalam perkembangannya bisa dilembagakan.

²⁸ *Ibid*, hlm. 306

²⁹ B.N. Marbun, S.H, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. II, 2003, hlm. 157

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc.Cit*, hlm. 939

³¹ B.N. Marbun, S.H, *Op.Cit*, hlm. 468

Cendekiawan bisa berpolitik, cendekiawan bisa berkelompok. Posisi cendekiawan akhirnya sudah multi fungsi dan mengalami pergeseran peran.

Selanjutnya berkaitan dengan peran ICMI, penulis mendapat informasi cukup memadai dari Skripsi yang ditulis oleh Fahamsyah Teja Yuhana, dengan judul *Peran Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam Pasca Orde Baru (Studi Analisis Terhadap Politik Ekonomi ICMI)* (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2004). Dalam skripsi mengulas tentang peran dan komitmen ICMI dalam membangun ekonomi kerakyatan sebagai pemulihan ekonomi nasional dan juga menggantikan ekonomi konvensional dengan sistem ekonomi Islam.

Selain itu menurut Fahamsyah, dalam peran politiknya, ICMI pada tahun 2003 mendesak pemerintah dan DPR/ MPR untuk segera melaksanakan tap MPR yang mengamankan penghentian kerjasama dengan IMF dan Bank Dunia (*World Bank*). Dengan alasan, kebijakan ekonomi ‘resep ala’ IMF dan Bank Dunia (*World Bank*) tidak membawa perbaikan kondisi ekonomi seperti yang diharapkan, akan tetapi membuat perekonomian nasional makin tidak menentu.³²

Ada juga buku berkualitas dengan judul *ICMI: Dinamika Politik Islam* yang ditulis oleh A. Makmur Makka dan Durorudin Mashad. Buku tersebut membicarakan kiprah dan peran ICMI dalam dinamika politik di Indonesia. ICMI dinilai sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial-kebudayaan, yang mampu menembus wilayah politik. Walaupun ICMI sudah dinobatkan sebagai gerakan

³² Fahamsyah Teja Yuhana, “*Peran Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam Pasca Orde Baru (Studi Analisis Terhadap Politik Ekonomi ICMI)*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004, hlm. 71-72. td

sosial-kebudayaan, tetapi wajah populer dari organisasi ini lebih sering dilihat dari kacamata politik.³³

E. Metode Penelitian

Dalam skripsi ini jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang mengkritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti.³⁴ Atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata yang menggambarkan objek penelitian dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya.³⁵

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu berusaha Untuk mengetahui Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005) dalam memberikan pesan moral dan etika politik kepada elite politik. Oleh karena itu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian pustaka, yaitu dengan cara menuliskan, mereduksi dan menyajikan data serta menganalisis.³⁶ Data diambil dari berbagai sumber tertulis yaitu berupa buku-buku.³⁷

1. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam identifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis, yaitu :

³³ A. Makka Makmur Dharorudin Mashad, Ibid, hlm. 57

³⁴ Mulyo Putro, *Pendekatan Kualitatif dalam Aplikasi Lapangan*, Makalah : Pelatihan Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, 1999

³⁵ Hasan Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet II, 1995, hlm. 67

³⁶ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 51.

³⁷ Hadari Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 30.

1. Sumber Data Primer, yaitu data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.³⁸ Data-data diperoleh dari Organisasi Wilayah ICMI Jawa Tengah, data ini merupakan data murni yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung, berupa dokumentasi, AD/ART, program kerja, arsip-arsip dan lain sebagainya.
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti dari subyek penelitian.³⁹ Dan untuk data-data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditulis. Dengan menggunakan metode yang dilakukan sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan terdapat di kantor Organisasi Wilayah (Orwil) ICMI Jawa Tengah. Dokumen yang bisa penulis pelajari adalah berupa data-data tentang pelaksanaan program dan penerapan visi-misi ICMI, yang kemudian diperkuat dengan data-data kepustakaan (buku, surat kabar/ media massa, internet).

³⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet-ke-1, hlm. 91.

³⁹ *Ibid.*, hlm 91.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁴⁰ Penulis akan mewawancarai Sekretaris Pengurus ICMI yang ada di Wilayah Jawa Tengah (Suharmono, S.E., M.Si.) dan Dewan Pakar ICMI Pusat Jakarta (Dr. H. Adi Sasono).

3. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data⁴¹, penulisan menggunakan metode analisa deskriptif. Yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.⁴²

Dalam kerangka analisa tersebut digunakan juga metode *content analysis* (analisis isi). Dipilihnya metode ini dikarenakan penelitian ini memiliki sumber data berupa teks dan dokumen. Disamping itu dikarenakan data yang dipakai adalah data deskriptif (data tekstular) yang hanya dianalisis menurut isinya.⁴³ Adapun dalam melakukan analisis isi digunakan cara yang obyektif dan sistematis. Dengan metode ini penulis berusaha

⁴⁰ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm. 105

⁴¹ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, (1975;79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Dr. Lexy J. Moleong, MA, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet VI, hlm. 103

⁴² Hasan Nawawi, *Ibid* hlm. 68

⁴³ Sumardi Suryabrata, *Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet. I, hlm. 40.

mendeskripsikan bagaimana Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005).

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagai berikut: Judul: Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998-2005). Penulis membagi pembahasan penulisan skripsi ini menjadi beberapa bab, yaitu :

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan Skripsi. Dalam bab pendahuluan ini penulis mendeskripsikan tentang lahirnya gerakan pembaharuan kelompok Islam.

BAB II : Bab ini merupakan landasan teori untuk kajian selanjutnya, berisi tentang pembahasan Islam dan Politik di Indonesia, yang berisi tentang Islam dan Politik pada Orde Lama (1945-1966), Islam dan Politik pada Orde Baru (1966-1998), Islam dan Politik pada Era Reformasi (1998-2005)

BAB III : Bab ini akan dibahas mengenai Gerakan Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam pada Era Reformasi (1998-2005), yang berisi tentang Selayang Pandang ICMI, ICMI dalam Dinamika Politik Islam, dan Gerakan Politik ICMI Pada Era Reformasi.

BAB IV : Bab ini merupakan Analisis Gerakan Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam pada Era Reformasi (1998-2005), yang berisi tentang Peran ICMI dan Dinamika Politik Islam di Indonesia. Dan Gerakan Politik ICMI dalam Politik Islam pada Era Reformasi.

BAB V : Penutup berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Barry, M. Dahlan Yacub, *Kamus Bahaasa Indoensia Kontemporer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik; Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997
- Bahar, Ahmad, *Biografi Cendekiawan Politik; Amin Rais Gagasan dan Pemikiran Mengagapai Masa Depan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'I; Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2001,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahaasa Indoensia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prospek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Ensiklopedi Islam, Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993
- Karim, Thorik Solikul, *Polarisasi dan Politik Islam Indonesia (Artikel)*, Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 107/ Juni-Agustus 2006,
- Majalah Ma'arif, Edisi 09/ IV/ Desember 2004-Maret 2005
- Makmur, A. Makka dan Dharorudin Mashad, *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996
- Materi dasar Nahdlatul Ulama Ahlussunnah Waljamaah; *Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, Semarang: PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002

- Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, “*Metodologi Penelitian Praktis*”, Yogyakarta : BP FE UGM, 1987
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Cet VI, 1995
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. II, 2003
- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, Cet II, 1995
- Putro, Mulyo, *Pendekatan Kualitatif dalam Aplikasi Lapangan*, Makalah : Pelatihan Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum dan Masyarakat, Fakultas Hukum Undip, 1999
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Rais, M. Amin, *Sikap Kami*, Surabaya: Pustaka Anda, Cet. I, 1999
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Yudhistira), 1990
- Umam, Ahmad Khoirul, “*Korupsi dalam Spektrum Politik Kiai; Studi Kasus Nahdlotul Ulama di Jawa Tengah*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2005, td
- Yuhana, Fahamsyah Teja, “*Peran Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam Pasca Orde Baru (Studi Analisis Terhadap Politik Ekonomi ICMI)*” Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004, td

Alhamdulillah. Salangkah deui euy.....!

BAB II

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA

Bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama (*dien*) dan politik (*dawlat*), sehingga Islam disebut sebagai agama sekaligus politik, *al-Islam dien wa al-dawlat*.¹ Berpolitik bahkan dipandang sebagai panggilan suci, sebagai manifestasi ibadah dan jihad. Berpolitik bahkan identik dengan kewajiban dakwah, sehingga melahirkan partai politik "berjenis kelamin ganda", sebagai partai politik sekaligus partai dakwah. Ulama² pun bukan hanya boleh berpolitik, tetapi bahkan jadi wajib berpolitik. Berpolitik atas nama agama, bahkan atas nama Tuhan. Politik dalam Islam (*Assyiyyasah fil Islam*) lebih pada pemaknaan cara, media atau wadah untuk menempatkan pencapaian kepentingan umat dalam bingkai norma keislaman (atau dengan istilah sederhana, yaitu politik yang Islami).

¹ Hubungan antara Islam dan politik di Indonesia memiliki tradisi yang amat panjang. Akar-akar genealogisnya dapat ditarik kebelakang hingga akhir abad ke-13 dan awal abad ke-14. Ketika Islam (seperti dikatakan banyak kalangan) pertama kali diperkenalkan dan disebarkan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya, yang kemudian inilah Islam, sambil mengadakan dialog yang bermakna dengan realitas sosio-kultural dan politik setempat terlibat dalam politik. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa, Islam sepanjang perkembangannya di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sejarah politik Indonesia. Meskipun ini tidak serta merta mengandaikan bahwa Islam secara inheren adalah agama politik. Bachtiar Effendi, *Loc, Cit.* hlm. 21-22

² Dalam teori modernisasi, ulama disebut sebagai bagian dari 'elit tradisional'. Jelasnya adalah sebagai 'sarjana tradisional' (*traditional scholar*) atau sarjana scholastic (*scholastic scholar*) yang berkecenderungan konservatif. Dalam suatu karangannya, Zuber Usman pernah membahas kedudukan dan peranan ulama, dan mengatakan bahwa dalam konteks masyarakat kaum muslim (dunia melayu di nusantara) kaum ulama ini adalah Cendekiawan, karena perannya yang progresif dibidang pemikiran, mengatasi masyarakat pada umumnya. M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, Cet. IV, 1999, hlm. 74

Politik selalu melibatkan persaingan, perebutan, dan konflik yang keras. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Tapi ukurannya kepentingan, bukan kebenaran dan moral. Kebohongan, manipulasi, dan siasat pun jadi pakaian sehari-hari. Kendati banyak hal positif dalam politik, namun pertarungannya memang sangat keras, dan tidak banyak orang idealis menjalaninya. Politik itu dunia rimba-raya. Tak berlebihan jika Muhammad Abduh yang semula aktif berpolitik, kemudian hengkang dari dunia yang dianggapnya kotor itu. Abduh sampai melakukan "talak politik" dengan mengatakan, "aku berlindung kepada Allah dari politik dan apa-apa yang menjadi urusannya". Wilayah politik tidak dapat disterilkan dari pengaruh agama. Sebaliknya nilai-nilai agama tersebut di ataslah yang harus mengendalikan kegiatan politik.³

Dengan demikian praktik politik tidak mungkin bisa dipisahkan dari nilai-nilai agama⁴, jika dengan politik itu ingin dibangun kehidupan yang demokratis

³ Menurut Muhammad Natsir bahwa, 'tanpa Islam, maka nasionalisme Indonesia itu tidak akan ada, karena Islam telah menanamkan benih-benih persatuan Indonesia. Bachtiar Effendi, *Op.Cit*, hlm.73. Muhammad Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Sebagai suatu ideologi, Islam mempunyai cakupan pengertian yang sangat luas, seluas dimensi kehidupan manusia itu sendiri. Ajaran Islam bukan semata-mata sebagai agama yang hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablum min Allah*), tetapi antara manusia dengan sesamanya (*hablum minan naas*). Islam sebuah ideologi yang mampu membimbing manusia dalam hidupnya di dunia guna mencapai kebahagiaan dikahirat kelak. Dalam kehidupan berpolitik, manusia membutuhkan dasar ideologi. Dengan demikian, seorang muslim tidak mungkin melepaskan keterlibatannya dalam politik tanpa memberi perhatian kepada Islam. Berdasarkan pemikiran ideologinya itu, Muhammad Natsir menolak segala bentuk pemikiran sekular, sebab pemikiran tersebut mengabaikan nilai-nilai transedental Islam. Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam; Soekarni Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, Cet. I, 2002. hlm. 112-114

⁴ Menurut Dr. V. Fitzgerald (orientalis) mengatakan bahwa "Islam bukanlah semata agama (*a religion*), namun ia juga merupakan sebuah sistem politik (*a political system*). Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam, yang mengklaim diri mereka sebagai kalangan 'modernis', yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamental bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain". Demikian juga menurut Dr. Schacht berkata (orientalis) bahwa " Islam lebih dari sekadar agama: ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang lebih sederhana, ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan". Dan Prof. R. Strothmann (orientalis) berkata: "Islam adalah suatu fenomena agama dan politik. Karena

dan menjejahterakan masyarakat. Sebaliknya jika dipisahkan dan dipertentangkan akan terjadi kerusakan dan kekacauan. Dunia politik sangat menggiurkan. Ia menghipnotis setiap warga negara yang hobi politik: pengusaha, agamawan, kaum muda, mahasiswa, santri dan lain-lain. Mendatangkan uang dengan mudah, kerja ringan, kekebalan politik dan kadang-kadang hukum, akses ke jalur kekuasaan dan keuntungan lain yang melimpah. Boleh dikatakan, politik adalah bisnis yang sangat menjanjikan bagi warga negara yang hidup di dunia ketiga seperti Indonesia ini. Politik juga kadang-kadang tidak memerlukan investasi yang banyak, meskipun sesungguhnya membutuhkan segala-galanya.

A. ISLAM DAN POLITIK ORDE LAMA

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, yang merupakan langkah awal dari babak baru lembaran bangsa Indonesia dalam pemerintahan Orde Lama. Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan lonceng kematian bagi zaman kolonialisme Belanda atau Jepang. Dengan proklamasi pula lah roda sejarah mulai berputar. Seluruh kebijakan politik yang selama tiga setengah abad berjalan harus berhenti, bahkan ada bagian-bagiannya yang dengan serta-merta harus dicampakkan.

Lalu apa yang terjadi pada masa-masa antara tahun 1945-1965 ? Kaum nasionalis sekular yang keberadaannya merupakan warisan zaman penjajahan Belanda masih menduduki posisi mayoritas dikalangan birokrasi dan lapisan

pembangunnya adalah seorang Nabi, yang juga seorang politikus yang bijaksana, atau "negarawan". Muhammad Dhiauddin Rais, *Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah* (Teori Politik Islam) Terj, <is-lam@isnet.org>, Thu, 10 Aug 2000.

intelektual atau semi- intelektual bangsa. Keadaan yang mulai berubah setahap demi setahap adalah yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, diluar pemerintahan. Sejak tahun 1960-1965 mulai lahir generasi baru bangsa, yaitu generasi intelektual (semi-intelektual) religius Islami sebagai buah dari terjadinya mobilitas vertikal dari kalangan anak-anak petani, pedagang, maupun buruh kecil yang mayoritas muslim.⁵

Era tersebut memeberikan ‘angin segar’ kebebasan kepada berbagai aliran politik untuk membentuk parta-partai politik sebagai wahana demokrasi.⁶ Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh umat Islam.

Tepatnya tanggal 7-8 Nopember 1945 umat Islam mengadakan kongres di gedung madrasah mua’llimin Muhammadiyah Yogyakarta dengan nama Majelis Syura Muslim Indonesia (Masyumi)⁷. Pada pembentukannya, Masyumi merupakan wadah bagi kekuatan politik Islam untuk bernaung

⁵ Hartono Mardjono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996, hlm. 22-23

⁶ Setelah pemerintah mengeluarkan Maklumat nomor X tanggal 3 Nopember 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta tentang anjuran membentuk partai-partai politik. Dilihat dari segi ideologis, partai-partai politik tersebut dapat dibedakan atas tiga jenis. **(1) Ideologi Islam**, yang diwakili oleh Masyumi (lahir 7 Nopember 1945), Partai Syarikat Islma Indonesia / PSII (keluar dari Masyumi tahun 1947), Persatuan Tarbiyyah Islamiyyah (Perti) dan Nahdlatul Ulama / NU (keluar dari Masyumi tahun 1952). **(2) Ideologi Nasional Sekuler**, diwakili oleh Partai Nasional Indonesia / PNI (lahir Januari 1946) **(3) Ideologi Marxis-Sosialis**, diwakili oleh Partai Sosialis (lahir 10 Nopember 1945), Partai Komunis Indonesia / PKI (lahir 8 Nopember 1945), Partai Rakyat Sosialis (Pimpinan Sultan Syahrir, lahir 20 Nopember 1945) dan Pesindo. Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara; dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pres, Cet. I, 1996, hlm 158-159.

⁷ Pada mulanya, yang masuk Masyumi hanya empat organisasi, yaitu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam. Namun dalam perkembangannya, hampir semua organisasi Islam –kecuali Perti – baik lokal maupun nasional menjadi anggotanya. Abdul Aziz Thaba, *Ibid*, hlm 159. Keikut-campuran kelompok-kelompok keagamaan dalam politik, peranan partai-partai politik keagamaan dan konflik-konflik politik disekitar ideologi- ideologi keagamaan merupakan fenomena yang dapat diteliti dan diterapkan dengan memakai ukuran kepercayaan. Beberapa persoalan mengenai agama dan politik sangat rumit dan jawabannya jauh lebih sukar untuk dipahami. Persoalan-persoalan tersebut menyangkut penilaian dan pendirian yang berorientasi pada faham keagamaan tradisional ditengah-tengah sistem politik modern. Donald Eugene Smith, *Agama dan Perkembangan Politik*, Surabaya: Sinar Wijaya, Cet. I, 1988, hlm. 179

menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi umat Islam sebagai kekuatan politik di Indonesia. Kongres tersebut melahirkan dua keputusan, pertama pembentukan sebuah partai dengan nama Masyumi. Kedua, umat Islam telah memiliki partai politik. Hal tersebut merupakan awal umat Islam berkiprah dalam panggung politik setelah proklamasi kemerdekaan RI.

Antara tahun 1945-1949, segala potensi kekuatan sosial-politik di Indonesia diabdikan untuk mempertahankan kemerdekaan, setelah Belanda dengan membonceng pihak sekutu datang kembali untuk menjajah Indonesia. Perjuangan partai politik Islam pada masa revolusi ini hampir total. Mereka menolak segala perundingan dengan Belanda karena dipandang menodai perjuangan. Kalau diperhatikan jalan pikiran yang melandasi organisasi-organisasi pergerakan kemerdekaan diatas, maka jelaslah bahwa ketidakadilan dan kemerdekaan yang merupakan unsur utama.

Akan tetapi bagaimana tuntutan-tuntutan tersebut bisa diterapkan ke dalam pemikiran yang mengikat kelompok-kelompok orang, maka beragam alasan yang bisa diketengahkan. Seperti halnya organisasi Syarikat Islam, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan NU. Kelompok ini mencari dasar bagi tuntutan untuk merdeka dari ajaran-ajaran Islam. Lain halnya dengan organisasi politik PNI, Partindo, Perinda yang melihat kemerdekaan sebagai hak setiap orang dan sekelompok orang yang tertelingkup di dalam suatu bangsa, tanpa perlu menghubungkan dengan suatu ajaran agama tertentu. Dan

PKI misalnya mencari dasar bagi perjuangan partai kepada ajaran-ajaran Karl Marx.⁸

Islam politik secara sederhana diidentikkan dengan organisasi-organisasi politik Islam. Lebih khusus lagi, Islam politik bahkan disejajarkan dengan struktur, aktivitas dan tujuan partai politik Islam. Dimulai dengan empat partai politik Islam pada dekade 1950-an : Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Persatuan Tarbiyah Islam (Perti). Salah satu unsur paling mencolok dari Islam politik dapat ditemukan dalam partai-partai politiknya, tetapi jelas tidak dapat diterima jika dikatakan bahwa itulah satu-satunya ekspresi atau identifikasi yang sah. Jika makna Islam politik dibatasi hanya pada partai-partai politik Islam, maka bagaimanakah menjelaskan secara memadai seruan ‘Islam Yes, Partai Islam No’ yang disuarakan secara konsisten oleh Nurkholis Madjid.⁹

Masa tahun 1950-1957 ditandai oleh jatuh banggunya partai-partai politik yang berumur rata-rata kurang dari setahun. Setelah NU keluar dari Masyumi¹⁰, partai politik Islam diwakili oleh Masyumi, NU, PSII dan Perti.

⁸ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. X, 2003, hlm. 23

⁹ Bachtiar Effendi, *Op. Cit.* hlm. 51

¹⁰ Dalam konferensi PBNU se-Jawa dan Madura di Jagalan pada tanggal 5-6 April 1952. diputuskan bahwa NU keluar dari Masyumi. Keputusan tersebut dikukuhkan dalam Mukktamar NU di Palembang pada bulan Oktober 1952. Ada beberapa alasan NU keluar dari Masyumi, diantaranya : (1) NU tidak menyetujui peubahan rumusan majelis syura dalam AD/ ART Masyumi pada muktamar ke-14 tanggal 15-18 Desember 1949 di Yogyakarta. NU menganggap bahwa dengan menjadikan majelis syura sekadar badan penaseha, organisasi ini tidak memberikan tempat yang layak bagi ulam. (2) Berkaitan dengan pembentukan kabinet, pada saat kabinet Sukirman, keinginan NU tidak terpenuhi untuk menduduki kursi Menteri Agama didalam kabinet yang akan dibentuk. Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.* hlm. 163-164

Peranan partai politik Islam dalam kabinet-kabinet pada kurun waktu tersebut mengalami pasang surut seiring dengan jatuh-bangunnya kabinet.¹¹

NO	KABINET	PARTAI POLITIK	KURSI MENTERI	KETERANGAN
1.	Muhammad Hatta (1950)	Masyumi	4	PSII dan Perti tidak masuk
2.	Muhammad Natsir (1950-1951)	Masyumi	4	
		PSII	2	
3.	Sukirman (1951-1952)	Masyumi	5	PSII dan Perti tidak disertakan
		PNI	5	
4.	Wilopo (1952-1953)	Masyumi	4	
5.	Ali Sastroamijoyo I (1953-1955)	NU	3	Masyumi tidak diikuti
		PSII	2	
6.	Burhanudin Harahap (1955-1956)	Masyumi	4	Karena ada perbedaan NU dan PSII menarik diri dari kabinet.
		Merangkul NU dan PSII		
7	Ali Sastroamijoyo II (1956-1957)	Kabinet ini merupakan kabinet koalisi PNI, Masyumi dan NU (ke-3 partai terbesar) hasil dari pemilu tahun 1955 disamping PKI. Tetapi PKI tidak diikutsertakan karena ditentang oleh Masyumi dan NU.		

Namun, iklim dan sistem politik pada saat itu tidak memberi peluang bagi terjadinya mobilitas horizontal dikalangan generasi baru tersebut. Sistem politik yang berlaku adalah demokrasi terpimpin yang bersendikan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom), sebuah sistem politik yang sudah jauh menyimpang dari dasar-dasar kesepakatan bersama ketika negara didirikan pada 17 Agustus 1945.¹²

Politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi-interpretatif semacam ini. Pada sisi lain, hampir setiap muslim percaya akan pentingnya prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan politik. Pada saat yang sama, karena sifat Islam yang multi-interpretatif itu, tidak pernah ada

¹¹ *Ibid*, hlm. 166

¹² Hartono Mardjono, *Op. Cit*, hlm. 23

pandangan tunggal mengenai bagaimana seharusnya Islam dan politik dikaitkan secara pas. Bahkan sejauh yang dapat ditangkap dari perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktek politik Islam, ada banyak pendapat yang berbeda, beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang sesuai antara Islam dan politik.¹³

B. ISLAM DAN POLITIK ORDE BARU

Di Indonesia, dalam hal hubungan politiknya dengan negara sudah lama Islam mengalami jalan buntu. Baik pemerintahan Presiden Soekarno maupun Soeharto memandang partai-partai politik yang berlandaskan Islam sebagai pesaing kekuatan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis. Terutama karena alasan ini, sepanjang lebih dari empat dekade, kedua pemerintahan tersebut berupaya untuk melemahkan dan ‘menjinakkan’ partai-partai Islam.

Akibatnya, tidak saja hanya para pemimpin dan aktivis Islam politik gagal menjadikan Islam sebagai dasar ideologi dan agama negara pada tahun 1945 (menjelang Indonesia merdeka) dan lagi pada akhir tahun 1950-an. Pendek kata Islam politik telah berhasil dikalahkan baik secara konstitusional, fisik, birokratis, lewat pemilihan umum maupun secara simbolik. Yang lebih menyedihkan lagi, Islam politik seringkali menjadi sasaran ketidakpercayaan, dicurigai menantang ideologi negara pancasila.¹⁴

¹³ Bachtiar Effendi, *Loc. Cit.* hlm. 11

¹⁴ Keberhasilan relatif ‘politik penjinakan’ ini menyebabkan tersingkirnya Islam politik dari proses-proses politik bangsa. Selama 25 tahun pertama berkuasanya pemerintahan Orde baru, Islam politik bshksn menjadi ssaran kecurigaan ideologis-politis dan target politik ‘politik

Gerbang pemerintahan Orde Baru berawal dari Lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966,¹⁵ sebagai landasan formal dibawah garis komando Jenderal Soeharto. Pada awal pemerintahan Orde Baru, dikalangan aktivis Islam timbul optimisme untuk kembali memerankan peranan dominan dalam politik nasional, mengingat sumbangan mereka dalam meruntuhkan rezim Orde Lama. Kerjasama antara ABRI, organisasi mahasiswa dan kelompok Islam dalam menjatuhkan PKI dan Bung Karno setelah terjadinya G 30 S PKI, memberikan indikasi bahwa Islam mendapatkan legitimasi dalam peran politiknya.

Politik Islam Orde Baru mengalami dinamika yang berbeda selama tiga dasawarsa. Gerakan Islam yang beraneka warna ini mengalami peningkatan kegairahan, pada akhir tahun 1980-an, fenomena ini tidak lepas dari perubahan kebijakan politik rezim Soeharto terhadap gerakan Islam.¹⁶ Pada masa sebelumnya, pemerintah Orde Baru tampak sekali mempersempit ruang gerak ormas-ormas Islam.

Memang, sejak tahun 1959 sampai sekarang bangsa Indonesia menerima pemasangan politik yang menyebabkan inisiatif politik yang segar

penyingkiran' negara. Penyebabnya, Islam politik dicurigai tidak sepenuhnya mendukung ideologi negara pancasila. Bachtiar Effendi, *Ibid*, hlm. 333)

¹⁵ Penafsiran terhadap Supersemar sendiri berbeda-beda. Apakah Supersemar hanya merupakan instruksi kepada Jenderal Soeharto untuk melaksanakan tugas memulihkan keamanan, stabilitas Negara dan menjaga kewibawaan Presiden Soekarno. Ataukah ia merupakan pelimpahan wewenang dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto? Ironisnya, naskah asli Supersemar sampai kini belum diketemukan, sehingga sering menimbulkan pergunjangan. Aziz Thaba, *Op. Cit*, hlm 185. lihat juga B.J. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1985, hlm. 149

¹⁶ Banyak pihak memandang keterlibatan politik gerakan Islam dalam dunia politik bisa mempersulit pertumbuhan demokrasi. Kaum santri meletakkan keterlibatannya dalam dunia politik sebagai pemenuhan ajaran dan jalan pengabdian pada Tuhan (sabilillah). Perdebatan hubungan Islam dan politik, khususnya keterlibatan gerakan Islam dan kaum santri dalam dunia politik tak pernah selesai dan terus mewarnai setiap fase perkembangan politik nasional.

dan kreatif tidak dapat muncul diatas permukaan. Berdasarkan pengalaman pahit di masa Orde Lama itu (hidup dalam multi partai) maka Presiden Soeharto dengan sistem Demokrasi Pancasila-nya memangkas habis parpol yang banyak itu, sehingga hanya boleh hidup tiga saja, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketiga parpol tersebut harus mempunyai asas yang sama yakni Pancasila sebagai satu-satunya asas.¹⁷ Pemerintah Orde Baru mengambil langkah tersebut guna menstabilkan politik dengan cara menyederhanakan partai-partai politik menjadi tiga kontestan.

Kondisi ini pula yang kemudian menjadi terhadap pemerintahan Soeharto, yakni dianggap merampas hak asasi rakyat dengan melarang mereka mendirikan parpol. Dari gambaran itu, praktek sistem Demokrasi Pancasila ala Soeharto tersebut tidak jauh berbeda dari sistem Demokrasi Terpimpin ala Soekarno, yakni sama-sama dan menekan rakyat sehingga mereka tidak boleh berbeda pendapat dengan pemerintah.

Rezim Orde Baru memerankan panggung politiknya sendiri, yaitu : peminggiran politik Islam¹⁸ dan akomodasi politik Islam.¹⁹ Tekanan politik

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Op. Cit*, hlm. 208. Pada penghujung tahun 1960-an, segera setelah memerintah, para pemimpin Orde Baru mulai mengurangi arti penting partai-partai politik. Didukung beberapa intelektual, pemerintah menghendaki dilaksanakannya restrukturasi politik pada awal tahun 1970-an. Periode ini pemerintah Orde Baru menikmati kemenangannya yang pertama dalam pemilihan umum tahun 1971. Empat partai Islam yang ada pada waktu itu diharuskan untuk meleburkan diri kedalam sebuah partai baru, yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebuah partai Islam yang pada pertengahan tahun 1980-an didesak untuk menanggalkan ideologi dan simbol-simbol Islamnya. Nasib serupa juga harus dihadapi dua partai politik kristen dan tiga partai politik 'nasionalis' yang meleburkan diri dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Bachtiar Effendi, *Op. Cit*, hlm. 53

¹⁸ Dalam usaha meminggirkan politik Islam, ada tiga langkah yang diambil oleh rezim Orde Baru sebagai strategi mengurangi keterlibatan Islam dalam politik, yaitu : (1) Menghancurkan anggota politik dan partai Masyumi, (2) Penyederhanaan struktur partai politik

yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap umat Islam mendorong keshalehan beragama, sehingga memberikan ruang yang lebih bagi umat Islam dibanding dengan organisasi massa lainnya. Perkumpulan umat Islam menjadi pusat diskusi yang hangat mengenai politik dan moralitas.

Dengan adanya perkembangan semacam ini, umat Islam pada tahun 1980-an mengalami kebangkitan sosial yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Pada akhirnya, kebangkitan tersebut memaksakan Presiden Soeharto memikirkan kembali kebijakannya mengenai Islam, dengan berusaha merangkul kalangan Islam konservatif kedalam kekuasaannya.

Harapan semacam itu tampaknya menjadi kenyataan, dengan cita-cita terbinanya hubungan politik yang harmonis dan saling melengkapi antara Islam dan Negara (pemerintah). Salah satu bukti yang menunjukkan perkembangan baru tersebut adalah melunaknya politik Orde Baru, yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam.

Akhirnya, dalam hal pendekatan untuk mencapai tujuan, Islam politik tidak lagi menekankan upaya politik partisan dengan parlemen sebagai arena perjuangan yang utama. Sejak akhir tahun 1980-an, pendekatan yang lebih

dengan menggabungkan partai Islam kedalam satu partai, (3) Mendorong perkembangan institusi-institusi agama melalui Departemen Agama. M. Rusli Karim, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000, hlm. 72

¹⁹ Menurut Affan Gaffar (1996), politik akomodasi merupakan rumusan politik Orde Baru yang berupaya mulai peduli terhadap kepentingan kelompok Islam, semula masuk klasifikasi hitam. Hal ini dapat terlihat dalam sejumlah pelecehan aspirasi kelompok kepentingan Islam dalam banyak kasus dan puncaknya adalah pemberian label ekstrim kanan yang mendiskreditkan. Lewat politik akomodasi, Orde Baru melakukan evaluasi atas tindakan refresifnya, yang dimasa lalu mengakibatkan terkucilnya kepentingan kelompok Islam dari panggung politik. Tindakan remedial yang ditunjukan Orde Baru untuk mengoreksi interaksi buruk yang terjalin dengan kepentingan Islam merupakan indikasi terjadinya perubahan sikap dalam tubuh rezim itu terhadap kepentingan Islam. Ahmad Bahar, *ICMI ; Kekuasaan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pena Cendekia, Cet I, 1995, hlm. 139

integratif ini telah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan yang menggembirakan. Islam politik tampaknya telah menemukan jalan masuk untuk mengintegrasikan dirinya kedalam diskursus politik nasional.

Bukti yang memperlihatkan perkembangan baru ini adalah sikap negara yang mulai tampak ramah terhadap Islam. Termasuk kedalam langkah-langkah akomodatif ini adalah :²⁰

1. Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN) No. 2/ 1989²¹ yang mewajibkan diselenggarakannya pelajaran agama pada semua tingkat pendidikan negeri maupun swasta, tahun 1988.
2. Disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA)²² yang memperkuat posisi pengadilan-pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perkawinan, perceraian, rujuk, warisan dan wakaf, tahun 1989

²⁰ Bachtiar Effendi, *Loc. Cit.*, hlm. 335-336

²¹ Undang-undang yang diajukan atas inisiatif presiden tersebut tercantum adanya ketentuan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang harus diberikan kepada anak didik ditingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta. Selain itu, Disetujui pula untuk dimasukkan kedalam penjelasan bahwa apabila di sekolah-sekolah swasta terdapat sekurang-kurangnya 10 % anak didik yang memeluk agama lain dari agama yang dianut oleh penyelenggara sekolah swasta bersangkutan, penyelenggara mewajibkan menyediakan guru agama yang dipeluk oleh anak didik penganut agama lain tersebut Hartono Mardjono, *Loc. Cit.* hlm. 46-47. UU No. 2/ 1989 tentang sistem pendidikan nasional mempunyai arti penting bagi umat Islam, karena dengan undang-undang tersebut : (1) Diakui bahwa pendidikan agama merupakan substansi dari sistem pendidikan nasional, (2) Dikukuhkan bahwa pendidikan agama merupakan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah umum: SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, (3) Jaminan bahwa untuk mata pelajaran agama, tenaga pengajarnya haruslah yang seagama dengan peserta didiknya. Ketentuan ini sangat penting, karena siswa muslim yang bersekolah di sekolah Kristen/ Katolik dibandingkan sebaliknya, (4) Dijamin eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Institut Agama Islam. Abdul Aziz Thaba, hlm. 282

²² Bahwa sesuai dengan ketentuan tentang sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1974, bagi mereka yang beragama Islam berlaku hukum Islam dalam masalah-masalah perkara perkawinan, perceraian, rujuk, warisan, wakaf, hibah dan shadaqah. Jika terjadi persengketaan dalam masalah-masalah yang bersangkutan, bagi yang beragama Islam yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara adalah Pengadilan Agama (PA). *Ibid.*, hlm. 47. Menurut Menteri Agama Munawir Sadjali, kedudukan Peradilan Agama di negara pancasila Indonesia malah lebih kokoh dan lebih hormat dibandingkan dengan Peradilan Agama di 'negara-negara Islam' lainnya. Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit.*, hlm. 285

3. Pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang makin memperlebar jalan masuk struktural bagi kaum muslim untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan,²³ tahun 1990.
4. Kompilasi Hukum Islam²⁴, (Inpres No. 1 tahun 1991)
5. Dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri mengenai Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS), tahun 1991.
6. Dihapuskannya kebijakan lama yang melarang siswi muslim mengenakan jilbab pada jam-jam sekolah²⁵, tahun 1991.
7. Pelaksanaan Festival Kebudayaan Islam Istiqlal, tahun 1991.
8. Pembentukan Bank Muamalat Indonesia (BMI)²⁶, tahun 1991.

²³ Pembentukan ICMI yang seringkali dipandang sebagai indikasi terbesar pertama yang menunjukkan politik akomodasi negara terhadap Islam, belum (dan kemungkinan besar tidak akan pernah) mampu menandingi signifikansi struktural Muhammadiyah, NU, MUI, Golkar dan birokrasi negara dalam merealisasikan kepentingan Islam. Bachtiar Effendi, *Loc. Cit* hlm. 335

²⁴ Pada tahun 1985 Presiden Soeharto membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia untuk menyeragamkan acuan hukum Islam untuk menjadi pegangan yang seragam bagi hakim-hakim agama diseluruh Indonesia. Tahun 1987 proyek ini berhasil menyusun tiga rancangan, yaitu : Mengenai perkawinan, pembagian warisan, dan pengelolaan benda-benda wakaf, infak shadaqah. Setelah disempurnakan, maka sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, secara resmi diperintahkan untuk memasyarakatkannya sebagai kompilasi hukum Islam. Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit*, hlm. 285

²⁵ Ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Daud Yusuf, dengan sewenang-wenang menafsirkan bahwa karena jilbab tidak termasuk dalam ketentuan seragam sekolah, maka pemakaiannya dilarang. Kebijakan tersebut banyak siswi muslimah yang menjadi korban karena dikeluarkan oleh sekolah dengan dalih tidak mematuhi peraturan tentang seragam sekolah. Reaksi umat Islam sangat besar, sehingga melayangkan gugatan ke pengadilan yang akhirnya gugatan itu dikabulkan dan larangan pemakaian jilbab dinyatakan tidak sah. Hartono Mardjono, *Loc. Cit*, hlm. 49

²⁶ Inisiatif pembentukan bank yang bersandarkan pada syari'ah Islam, pertama kali datang dari MUI. Tonggak pertamanya diadakan lokakarya di Cisarua Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, dengan tema 'Masalah Bunga dan Perbankan'. Prakarsa ini kemudian dimatangkan dalam Munas MUI tanggal 22-24 Agustus 1990, hasilnya dibentuk tim perbankan kecil yang diketuai oleh Dr. Ir. M. Amin Aziz. Pada mulanya, nama yang akan dipakai adalah Bank Syari'ah Islam Indonesia. Tetapi nama ini tidak disepakati karena dikhawatirkan mengingatkan orang pada Piagam Jakarta. Kemudian muncul nama Bank Islam Indonesia, Bank Karya Islam dan Bank Amal Indonesia, ketiga nama dimunculkan kemudian juga tidak disetujui. Akhirnya disepakati Bank Muamalat Indonesia disingkat BMI. Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit*, hlm. 289. Berdasarkan undang-undang perbankan tahun 1991 yang berisikan pokok-pokok ajaran Islam tanpa sedikitpun menafikan sistem dalam dunia perbankan umum yang selama ini telah berjalan. Maka terbentuklah Bank

9. Penghapusan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB)²⁷, tahun 1993.

C. ISLAM DAN POLITIK ORDE REFORMASI

Mundurnya Soeharto dari posisinya sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya suatu era baru yang disebut era reformasi²⁸ dalam perkembangan Indonesia. Lengsernya kekuasaan orde baru memberikan harapan baru bagi kehidupan demokrasi di Indonesia dan awal dari era reformasi dari segala aspek kehidupan, dari ekonomi, politik, sosial dan budaya. Menjelang kejatuhan Soeharto telah muncul gerakan mahasiswa dan intelektual yang menyatakan perlunya reformasi.²⁹

Karenannya reformasi tidak akan pernah bisa mengubah Indonesia menjadi negara yang baik. Istilah reformasi ini menjadi sangat dikenal oleh seluruh masyarakat yang dianggap sebagai penyelamat kehidupan mereka, bahkan dianggap segala-galanya. Ia muncul sebagai akibat dari keterpurukan

Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh berdirinya bank-bank perkreditan rakyat syaria'ah di berbagai pelosok tanah air. Hartono Mardjono, *Loc. Cit.*, hlm. 48

²⁷ Sebelum lahirnya SDSB, judi diselenggarakan oleh dan atau sekurang-kurangnya atas restu pemerintah dengan istilah undian berhadiah seperti : Nasional Loterai (Nalo), Totalisator dan Porkas. Bahkan secara terang-terangan SDSB terselenggara dengan dukungan penuh dari Soedomo (Panglima Komkamtib). Setelah kabinet pembangunan V terbentuk dan suasana iklim politik baru setelah berakhirnya SU MPR 1988, judi SDSB dihapus. *Ibid.*, hlm. 50

²⁸ Kata reformasi dalam bahasa Inggris disebut *reformation* yang berarti penyusunan kembali. John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000, hlm. 473. Reformasi juga berarti perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) di suatu masyarakat atau negara). Sedangkan orang yang menganjurkan reformasi disebut reformis. Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, Cet 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 938.

²⁹ Reformasi merupakan era pembaharuan dalam sistem perpolitikan di Indonesia dan hampir dalam semua aspek. Era reformasi diawali dengan bergantinya era pemerintahan orde baru kepada pemerintahan Habibie. Sudirman Teba, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001, hlm. xiii.

ekonomi yang kemudian menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah, sehingga muncul gerakan reformasi³⁰ yang berkehendak untuk memperbaiki kehidupan bangsa menjadi bangsa yang bermartabat.

Reformasi boleh dikatakan merupakan hasil usaha bersama antara kelompok nasionalis (*abangan*) dan Islam (santri) dengan tema sentral KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Setelah itu, fenomena konflik santri *abangan* mulai muncul. Ada *Forkot*, *Promeg* (pro Megawati) sebagai simbol *abangan*, yang sejak pagi mengajukan sidang istimewa MPR. Ketika Habibie disahkan sebagai Presiden³¹ menggantikan Soeharto, mereka ramai-ramai menolaknya dan menganggapnya tidak konstitusional. Padahal, penyebab sebenarnya adalah karena mereka tidak suka apabila elit santri dalam ICMI mengisi kekosongan pemerintahan pasca-Soeharto.³² Tampaknya, sesudah masa Soeharto (Orba), Islam masih mencari jati dirinya, terutama dalam

³⁰ Gerakan reformasi muncul dari gerakan keagamaan pada abad ke-16, berkembang dalam lingkungan gereja dan masyarakat Eropa Barat. Pencetusnya, Martin Luther, adalah seorang rahib di Jerman yang banyak terpengaruh oleh kehidupan lingkungannya, baik pengalaman-pengalaman yang diperolehnya secara individual maupun pengalaman-pengalaman dan lingkungan kemasyarakatannya di Eropa. Sebagai seorang rahib, pemikirannya terpengaruh oleh pemikiran tokoh-tokoh gerakan yang ingin mengusahakan pembaharuan dalam gereja, baik yang dilakukan oleh pemikir-pemikir teologi; abad pertengahan yang berciri skolastik maupun pemikir-pemikir sesudahnya. Pada umumnya mereka memiliki dasar-dasar keyakinan yang kuat dan sungguh-sungguh atas kebenaran Injil. Keyakinan tersebut kemudian diikuti oleh para pemikir gereja yang lain dan mereka pula yang dapat dikatakan sebagai kaum yang telah merintis jalan ke arah reformasi. Romdhon, dkk, *Agama-agama Besar di Dunia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, hlm. 385-386.

³¹ Penunjukkan Habibie sebagai penggantinya didasarkan pada pasal 8 UUD 1945. Habibie tidak hanya seorang jenius di bidang kedirgantaraan yang saat itu menjabat wakil presiden, namun juga seorang murid politik Soeharto. Dibandingkan dengan gurunya, Habibie tidak cukup beruntung. Ia mewarisi negara yang berantakan serta posisinya yang tampak lemah *vis-a-vis* rakyat.

³² Anwar Haryono, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 83

politik. Masa Soeharto memang telah menyingkirkan kalangan Islam dari perpolitikan resmi.³³

Salah satu dari perubahan yang paling jelas adalah munculnya berbagai partai Islam setelah Habibie dengan resmi memutuskan untuk menghapuskan sistem tiga partai yang dipaksakan oleh Suharto. Pembentukan partai-partai Islam bertambah momentumnya dengan penghapusan Undang-Undang tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi organisasinya.³⁴ Hal demikian berakibat pula terhadap dinamika politik umat Islam berupa terjadinya ledakan partisipasi politik serupa, dengan penyikapan yang berbeda. Sebagian dengan cepat menyimbolisasi Habibie dan pemerintahannya sebagai representasi Islam politik dan dengan alasan itu, mereka mendukungnya hampir tanpa reserve. Sebagian lain memanfaatkan suasana reformasi pasca-Soeharto sebagai momentum sejarah termasuk merevitalisasi kritisisme dan *bargaining position* (daya tawar politik Islam).³⁵

Sejak awal kepemimpinannya, ia banyak melakukan tindakan populer guna mendongkrak legitimasinya dan pada saat yang sama memasang kuda-kuda untuk pertarungan memperebutkan kursi presiden periode berikutnya. Sejarah mencatat bahwa Habibie telah memberi kebebasan yang luar biasa kepada dunia pers, membebaskan tahanan politik (tapol) dan narapidana politik (napol), menggusur Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

³³ Republika, 12 April 2000, hlm.10

³⁴ Chris & Peter Van Dierman, *Indonesia Di tengah Transisi:Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Terj. Landung S, Y Heryanto, Sujanti Marsudi, Yogyakarta: LkiS, 2000, hlm. 375

³⁵ Kuntowijoyo, *Agenda Umat Islam Era Reformasi*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 21

(P4) dari wacana politik nasional, menghapus keharusan pemakaian asas tunggal Pancasila bagi organisasi massa (ormas) dan organisasi politik (orpol), mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Daerah, kebebasan mendirikan partai politik bagi seluruh masyarakat dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan Juni 1999.

Dua butir yang disebut terakhir ternyata disambut oleh masyarakat dengan kegembiraan yang meluap-luap (*euphoria*). Pengungkapannya mengambil bentuk mendirikan partai dalam jumlah yang sangat besar (181 partai) yang diandaikan dapat berfungsi sebagai instrumen politik paling signifikan.

Reformasi tidak akan ada artinya jika tidak memiliki agenda yang jelas. Agenda reformasi memberikan penegasan konkret bahwa bangsa Indonesia memang membutuhkan perbaikan secara politik, ekonomi dan sosial. Agenda reformasi itu dirumuskan dalam empat agenda pokok, yaitu :³⁶

1. Amandemen UUD 1945 yang sudah sangat kadaluwarsa, *out of date*, karena UUD 1945 awalnya dimaksudkan sebagai konstitusi sementara (6 bulan, setelah dibuat), tetapi sampai sekarang masih berjalan dan umumnya masih *in take*.
2. Reposisi TNI/Polri. Dengan reposisi ini dwifungsi TNI/ Polri mulai direkonstruksi kembali. TNI/Polri tidak perlu lagi ikut terlibat dalam politik praktis karena tempat mereka di barak.

³⁶ Amien Rais, *Menyelamatkan Agenda Reformasi* (artikel), dalam Lukman Hakim, *Reformasi dalam Stagnasi*, Yayasan Al-Qur'an Mukmin, 2001, hlm. 1-2

3. Menegakkan supremasi hukum yang sudah mulai tercabik-cabik akibat kesalahan Orde Baru yang menggunakannya sebagai alat kekuasaan.
4. Membangun *good governance*. Salah satu cara untuk mencapai agenda ini adalah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bergulirnya gerakan reformasi seiring dengan lengsernya Soeharto telah memberikan harapan baru bagi semua kelompok politik di tanah air, termasuk kelompok agama. Dengan nilai-nilai *kebebasan, keterbukaan dan keadilan* yang dibawanya, gerakan reformasi telah memberikan peluang bagi kelompok agama untuk kembali tampil, ikut bermain di pentas politik nasional. Tokoh-tokoh agama kritis yang pada masa Orde Baru hanya bisa bermain di belakang layar, sekarang banyak yang sudah menjadi pelaku utama. Mereka tersebar di beberapa partai yang berasas dan berorientasi Islam. Misalnya, Deliar Noer di Partai Umat Islam, Soemargono dan beberapa kolega ideologisnya di Partai Bulan Bintang (PBB), Husen Umar di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan A.M. Fatwa di Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka telah mendapatkan kembali hak-hak politik mereka untuk ikut bertarung secara adil di pentas politik nasional.³⁷

Di era reformasi, terutama setelah adanya kebebasan politik, Islam mengalami kebangkitan. Ada perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru, yang mulai mengakomodasi

³⁷ Muhammad Sirozi, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004, hlm. 29-30.

aspirasi Islam. Aspirasi Islam lebih nampak di pentas politik nasional dibandingkan dengan periode Orde Baru yang belum sepenuhnya memberikan saluran politik Islam.

Karena itu, memotret perkembangan politik Islam Indonesia pasca-Orde Baru boleh jadi menemukan kebingungan. Belum habis periode "bulan madu" kalangan "Islam Politik" dengan negara Orde Baru yang berlangsung sejak awal 1990-an, tiba-tiba saja situasi politik berubah menjadi sangat membingungkan dengan jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Soeharto, yang pada awalnya dipahami oleh kalangan Islam Politik sebagai "pintu", "instrumen", bahkan "patron" dalam upaya memperbesar akomodasi dan representasi politik Islam, tiba-tiba saja diposisikan sebagai musuh bersama publik, bahkan oleh sebagian besar kalangan Islam sekalipun.

Kejatuhan rezim Orde Baru membangkitkan kesadaran politik umat Islam untuk menyongsong periode baru, yakni periode kebangkitannya. Reformasi adalah awal periode kebangkitan kembali politik Islam di Indonesia. Kebangkitan politik Islam sesungguhnya telah mewarnai dinamika politik nasional, terutama dengan banyaknya bermunculan partai Islam dan ormas Islam. Reformasi Mei 1998 telah mendatangkan liberalisasi dan relaksasi politik yang cukup besar. Situasi ini telah memungkinkan lahirnya partai politik dalam jumlah yang sangat banyak. Di antara organisasi politik yang muncul itu ada partai-partai yang mempunyai social origin Islam.

Sebagai kelanjutan dari asal usul sosial yang demikian itu, ada partai yang menegaskan diri sebagai partai Islam. Ini tampak terutama dalam simbol

dan asas partai. Ada pula yang merasa tidak perlu menyatakan diri sebagai partai Islam.³⁸ Pendirian partai Islam marak, seperti dicatat Kuntowijoyo. Ada 11 partai dari 48 partai politik yang menjadi peserta pemilu 1999. Yaitu, PUI (Partai Umat Islam), PKU [Partai Kebangkitan Umat), Partai Masyumi Baru, PPP, PSII (Partai Syarikat Islam), PSII 1905 (Partai Syarikat Islam 1905), Masyumi (Partai Politik Islam Masyumi), PBB, PK, PNU (Partai Nahdlatul Ulama, dan PP (Partai Persatuan).

Partai Islam yang dikategorikan sebagai modernis pada masa Orde Lama adalah Partai Masyumi. Tetapi partai ini telah bubar pada tahun 1960. Pada era reformasi ini muncul sejumlah partai Islam yang ingin menghidupkan semangat Masyumi. Seperti partai Masyumi Baru, partai politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Bulan Bintang (PBB). Tetapi hanya PBB yang memperoleh suara cukup signifikan dibanding dengan kedua partai Masyumi tadi.³⁹

Partai-partai ini menganggap bahwa satu-satunya jawaban bagi Islam dalam politik ialah Islam sebagai ideologi. Karena itu, Islam dijadikan sebagai dasar partai. Dalam perspektif seperti ini, kemunculan partai-partai Islam dan partai-partai lain yang mempunyai kekhususan Sebanding dipahami sebagai reaksi atas tatanan politik monolitis yang menafikan keragaman ciri dan aspirasi (seperti kebijakan asas tunggal), kemudian kemunculan partai-partai Islam dengan seluruh kekentalan bahasa dan simbolisme politik mereka,

³⁸ Lahirnya sejumlah partai politik Islam pasca Orde Baru ini menandai bangkitnya kembali politik Islam, yaitu Islam berkembang sebagai lembaga politik. Sebelumnya Islam politik telah berakhir sejak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengganti asas Islam dengan Pancasila, dalam muktamarnya yang pertama tahun 1974. Sudirman Tebba, *Op. Cit.* hlm 55)

³⁹ *Ibid.*, hlm. 56-57

merupakan sesuatu yang niscaya. Fenomena banyaknya partai Islam di masa reformasi merupakan refleksi kemajemukan umat Islam dan keberagaman kepentingan kelompok Islam.

Kelompok Islam modernis lebih menyukai partai politik yang tidak membawa bendera Islam, tetapi memiliki komitmen terhadap Islam. Karena mereka (kelompok modernis) melihat bahwa politik bukan tujuan, melainkan hanya salah satu sarana untuk memperjuangkan aspirasi umat. Mereka menyadari bahwa aspirasi umat Islam tidak hanya dibidang politik, seperti partai, tetapi juga dibidang lain seperti perbaikan ekonomi dan pendidikan. Untuk mewujudkan semua itu tidak harus melalui partai yang secara forma menyebut dirinya partai Islam.⁴⁰

Kelahiran partai-partai Islam merupakan buah euforia politik yang tak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun lebih terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik. Namun kemunculan partai-partai Islam telah menimbulkan perdebatan dan kontroversi.

Dalam pandangan sementara kalangan, fenomena ini dinilai sebagai perwujudan dari "hadirnya kembali politik Islam" atau yang secara salah kaprah diistilahkan sebagai "repolitisasi Islam". Penilaian pertama (hadirnya kembali politik Islam") bernada positif, karena seperti agama-agama lain Islam memang tidak bisa dipisahkan dari politik. Sedangkan penilaian yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm 57

lain, intonasinya, jika istilah itu dipahami secara benar adalah negatif. Istilah "politisasi" (terhadap apa saja) selalu merupakan bagian dari rekayasa yang bersifat pejoratif atau manipulatif.

Bisa dibayangkan, apa jadinya jika fenomena tersebut dikenakan pada sesuatu yang mempunyai sifat ilahiah (*diviene*) seperti agama, dalam hal ini adalah Islam. Meskipun demikian, kalau menilik indikator utama yang digunakan sebagai dasar penilaian itu adalah munculnya sejumlah partai yang menggunakan simbol dan asas Islam atau yang mempunyai pendukung utama komunitas Islam, maka tidak terlalu salah untuk mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah munculnya kembali kekuatan politik Islam.

Kemunculan banyak partai politik yang berasaskan agama, baik Islam maupun Kristen, merupakan salah satu fenomena politik menarik pada masa pasca-Soeharto. Kebangkitan partai-partai seperti ini, khususnya Islam, mendorong munculnya semacam kekhawatiran kalangan sementara pihak, baik dalam maupun luar negeri. Kekhawatiran itu menyangkut; apakah parpol-parpol Islam itu merupakan indikasi dari kemunculan "fundamentalisme Islam" di Indonesia. Kekhawatiran ini tidak diragukan lagi bersumber dari pandangan dan citra terhadap gerakan militan dan radikal Islam di Timur Tengah yang sering disebut sebagai "fundamentalisme Islam".⁴¹

Seiring dengan kebebasan yang diberikan rezim Habibie, ormas-ormas Islam semakin menunjukkan momentumnya untuk melakukan gerakan

⁴¹ Azyumardi Azra, *Fundamentalisme Partai Islam*, dalam Hamid Basyaib dan HamidAbidin (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alfabet, 2000, hlm. 37.

memperjuangkan aspirasi Islam secara radikal. Forum Komunikasi *Ahlussunah Waljamaah* (FKASW), *Ikhwanul Muslimin*, HAMAS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menyusul ormas Islam lainnya yang sudah berdiri di masa Orde Baru, seperti Front Pembela Islam (FPI), Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Kelompok tersebut merupakan Gerakan pro syariat, yaitu gerakan Islam politik yang memperjuangkan penegakkan syariat Islam dalam kehidupan bernegara. Bentuk kongkrit perjuangannya adalah seruan kembali ke Piagam Jakarta sebuah dokumen konstitusi yang memuat dasar negara Pancasila dengan rumusan sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."⁴²

Karena itulah, kebangkitan politik Islam ditandai dengan maraknya partai-partai Islam dan ormas-ormas Islam berhaluan militan dan radikal. Sedangkan Islam moderat yang dimotori oleh Muhammadiyah dan NU yang menolak dengan tegas upaya-upaya untuk kembali ke Piagam Jakarta, yang ujung-ujungnya adalah pembentukan negara Islam, atau penerapan syariat Islam oleh negara. Kelompok tersebut mengalami penurunan daya jelajah dalam menyerap opini publik dan mempengaruhi masyarakat bawah. Inilah yang menjadi awal gerakan Islam radikal dan militan di Indonesia pasca-Orde

⁴² *Ibid*

Baru. Pada gilirannya, isu Piagam Jakarta dan pemberlakuan syariat Islam kembali menjadi wacana publik di pentas politik nasional.⁴³

Banyak pihak memandang keterlibatan politik gerakan Islam dalam dunia politik bisa mempersulit pertumbuhan demokrasi. Kaum santri meletakkan keterlibatannya dalam dunia politik sebagai pemenuhan ajaran dan jalan pengabdian pada Tuhan (sabilillah). Perdebatan hubungan Islam dan politik, khususnya keterlibatan gerakan Islam dan kaum santri dalam dunia politik tak pernah selesai dan terus mewarnai setiap fase perkembangan politik nasional.

⁴³ Sukron Hakim, *Peta Gerakan Politik Islam Indonesia Pada Masa Reformasi (Tahun 1998-1999)*, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2004, td, hlm. 65

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, "Fundamentalisme Partai Islam", dalam Hamid Basyaib dan Abidin, Hamid (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalananan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 2000
- Bahar, Ahmad, *ICMI ; Kekuasaan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pena Cendekia, Cet I, 1995
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indenesia*, Jakarta: Grafiti, 1985
- Chris & Peter Van Dierman, *Indonesia Di tengah Transisi:Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Terj. Landung S, Y Heryanto, Sujanti Marsudi, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Haryono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Kuntowijoyo, *Agenda Umat Islam Era Reformasi*, Bandung: Mizan, 1999
- Mardjono, Hartono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996
- Rais, Amien, *Menyelamatkan Agenda Reformasi* (artikel), dalam Lukman Hakim, *Reformasi dalam Stagnasi*, Yayasan Al-Qur'an Mukmin, 2001
- Muhammad Dhiauddin Rais, *Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah* (Teori Politik Islam) Terj, <is-lam@isnet.org>, Thu, 10 Aug 2000.
- Republika, 12 April 2000

- Romdhon, dkk, *Agama-agama Besar di Dunia*, IAIN Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan Pembangunan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. X, 2003
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam; Soekarni Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, Cet. I, 2002.
- Teba, Sudirman, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara; dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pres, Cet. I, 1996
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK Group, 2004
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Perkembangan Politik*, Surabaya: Sinar Wijaya, Cet. I, 1988

Sakeudik deui, Kejar tayang...man....!!!!

BAB III
GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI
(1998 – 2005)

Salah satu fenomena yang menarik dalam percaturan politik Indonesia adalah meningkatnya pembahasan seputar Islam dan perkembangannya dalam bidang politik. Bagi yang melihatnya sebagai perkembangan positif, kembalinya Islam dalam percaturan politik tampak tepat waktu dan tanggap dari komunitas masyarakat Islam, mengingat Islam sebagai kekuatan sosial dan politik masyarakat, telah menghilang dalam waktu yang telah lama.

Salah satu bidang yang berkaitan dengan berbangsa dan bernegara adalah politik. Cendekiawan¹ muslim Indonesia sejak dulu telah aktif dan intensif mewarnai wacana dan praksis perpolitikan di negeri ini. Bahkan pada ujung era 1980-an wacana politik Indonesia mengenal apa yang disebut gejala ‘Islamisasi’ ditingkat elite, yang dinisbatkan dengan munculnya ICMI dan aktifisme ormas Islam, seperti DDII, KISDI, HMI dan KAHMI dalam pentas politik formal.²

Pada tahun 1984, Presiden Soeharto memutuskan untuk ‘berubah haluan’, kemudian beliau melakukan upaya Islamisasi, melalui berdirinya ICMI, sebagai

¹ Cendekiawan adalah orang yang karena pendidikannya baik formal. Informal maupun non-formal mempunyai perilaku Cendekia. Kecendekiaan ini tercermin dalam kemampuan melihat, menafsirkan dan merespon lingkungan hidupnya dengan sifat kreatif, kritis, obyektif, analitis dan bertanggungjawab. Karena sifat kecendekiaan itu mempunyai wawasan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan pengertian diatas, belum tentu seorang ilmuwan atau akademikus adalah seorang Cendekiawan. Disamping itu kedalam kategori Cendekiawan dapat pula dimasukkan : ulama (agamawan), budayawan, seniman. Dengan kata lain ialah para ilmuwan yang mempunyai sifat dan perilaku Cendekia. A. Rifa’I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa; Pertemuan Cendekiawan Muslim Pertama*, Jakarta; PLP2M, Cet. I, 1987, hlm. 53

² Muhammad A.S. Hikam, *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, Cet. I, 2000, hlm. 195

seorang militer dan karena tidak mau disebut berpihak kepada salah satu dari kedua organisasi Islam (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), maka Presiden Soeharto memilih untuk tidak mengutamakan aspek budaya dari gerakan Islam, melainkan lebih menekankan pada aspek kelembagaan/ institusionalnya saja.³

Pada masa dasawarsa 1980-an pula mulai tampak sosok Cendekiawan Muslim. Sebutan 'Cendekiawan Muslim' tidak diberikan kepada diri sendiri oleh mereka yang telah mencapai gelar akademis tertinggi tersebut. Sebutan itu tidak bermaksud sebagai penghargaan dan pemberian status, melainkan lebih merupakan cetusan harapan untuk mengemban suatu misi tertentu sesuai dengan posisi 'elit'⁴ yang diduduki oleh kelompok Cendekiawan.

A. Selayang Pandang Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

Lahirnya ICMI adalah salah satu corak pengejawantahan kebangkitan kembali Islam Indonesia. Ini bisa disebut sebagai satu proses alamiah bagi setiap komunitas yang ingin mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Kebangkitan agama itu secara mencolok juga ditandai dengan tampilnya Islam sebagai "ideologi peradaban" dunia dan kekuatan alternatif bagi perkembangan peradaban dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka menjadi terancam.

³ Abdurrahman Wahid, *Birokratisasi Gerakan Islam* (Artikel), Kompas, 30 Agustus 2006, hlm. 6

⁴ Menurut definisinya elit adalah kelompok yang dianggap memiliki kelebihan-kelebihan (*nation of superiority*) tertentu dibanding masyarakat kebanyakan, dan kelebihan itu adalah pemilikan ilmu pengetahuan. M. Dawam Rahardjo, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung; Mizan, Cet. IV, 1999, hlm. 24

Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban, lahir dari perasaan terancam Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali. Tetapi bagi umat Islam sendiri, kebangkitan yang muncul justru memberikan motivasi untuk mencari alternatif bagi munculnya transformasi nilai-nilai kultural yang membebaskan manusia dari kegelisahan batin dan ketidakpastian tujuan hidup, sebagai akibat perkembangan peradaban yang terlalu berorientasi pada materialisme.

Dalam situasi seperti ini, Islam ternyata menjadi pilihan yang lebih menjanjikan di banding dengan ideologi atau peradaban mana pun. Bertahap tapi pasti, semangat keislaman meningkat dan menyatu. Meningkatnya peran serta umat Islam itu ditunjang dengan adanya ledakan kaum terdidik (*intellectual booming*) di kalangan kelas menengah kaum santri Indonesia. Program dan kebijaksanaan pendidikan Orde Baru secara langsung maupun tidak langsung telah melahirkan generasi baru kaum santri yang terpelajar, modern,⁵ berwawasan kosmopolitan, berbudaya kelas menengah, serta mendapat tempat dalam institusi-institusi modern.⁶

Berkat kecakapan dan kemampuan akademik yang tinggi, kelas menengah "neo-santri" yang terpelajar itu dapat memasuki dan mengisi lapisan birokrasi, dunia kampus, dunia usaha, dan lembaga-lembaga

⁵ Beberapa kalangan sarjana Barat sendiri mempersoalkan perbedaan antara "modernisme" dan "modernitas". Yang pertama berkonotasi kuat pengagungan pola hidup zaman mutakhir ini sebagai "kebijakan final" umat manusia, perwujudan terakhir proses panjang sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradaban. jadi "modernisme", sebagai "isme", mendekati ketentuan tentang sebuah ideologi tertutup, sama dengan sekularisme, rasionalisme, dan lain-lain. Sedangkan "modernitas" adalah suatu ungkapan tentang kenyataan mengenai hidup zaman mutakhir ini. Ernest Gellner, misalnya, mengatakan bahwa hanya Islamlah dari semua agama yang ada yang esensi ajarannya tetap relevan dengan tuntutan segi positif modernitas. Nurcholis Madjid, *Islam dan Politik Modern*, <is-lam@isnet.org>, Rabu 10 Agustus 2000

⁶ www. icmi.or.id, Rabu 5 Mei 2004

masyarakat dengan profesionalisme yang teruji. Dengan kondisi yang membaik ini, maka pada dasawarsa 80-an mitos bahwa umat Islam Indonesia merupakan "mayoritas tetapi secara teknikal minoritas" runtuh dengan sendirinya.

Dengan mengemukakan hal diatas, tidak hendak mengatakan bahwa sebelumnya tidak mengenal sosok Cendekiawan Muslim. Pada tahun 1964 pernah dibentuk Ikatan Sarjana Muslim Indonesia (ISMI). ISMI dibentuk pada masa Orde Lama dalam rangka persaingan dan konflik ideologis-politis, khususnya dalam menghadapi komunisme dan pergerakan nasionalis-kiri. Tahun 1969 dibentuk Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Persami yang diprakarsai oleh H.M. Subchan Z.E. dengan tujuan berusaha untuk menghimpun semua sarjana muslim dari berbagai aliran politik keagamaan.⁷ Dibawah pimpinan Bintoro Tjokroamidjojo,⁸ Persami diarahkan untuk meningkatkan partisipasi sarjana muslim dalam proses pembangunan Orde Baru.⁹

Dari tanggal 26-28 Desember 1984 di gedung PKBI Jakarta berlangsung Pertemuan Cendekiawan Muslim pertama, yang bertema

⁷ Terbentuknya Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami) oleh sekitar 100 sarjana muslim, setengah diantaranya adalah alumnus HMI. Terpilih sebagai ketua HM. Subchan, Z.E. ketua PBNU yang terkenal dengan sikap kritisnya dan H.M. Sanusi, anggota PP Muhammadiyah. Dengan tokoh pucuk pimpinan yang berasal dari dua organisasi Islam terbesar mewakili aliran modern dan tradisional. Persami memproklamirkan diri sebagai 'anak semua partai politik' dan menghendaki tegaknya persatuan umat Islam Indonesia. Abdul Aziz Thaba, *Loc.Cit*, hlm. 227

⁸ Tiga tahun kemudian timbul pertentangan tajam antara kalangan anggota yang berasal dari PMII (ormas mahasiswa NU) dengan HMI. Pertentangan ini berawal dari keinginan HMI untuk menyingkirkan Subchan sebagai ketua umum. Alasannya pada saat itu Subchan juga menjabat wakil ketua MPRS sehingga sosoknya sebagai birokrat lebih tampak dari pada sebagai sarjana. HMI kemudian mengajukan salah seorang anggotanya yang bergelar M.A., Bintoro Tjokroamidjojo sebagai ketua umum Persami, karena dianggap lebih cocok. *Ibid*, hlm. 228

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Loc.Cit*, hlm. 23

“Perspektif Islam dalam Pembangunan”. Dengan menghadirkan para tokoh Cendekiawan Muslim sebagai narasumber, yaitu Dr. Ir. M. Amin Aziz, Dr. Ahmad W., Dr. Simuh, Fachry Ali, Jimly Ash-Shidiqi, S.H, Prof. Ahmad Sadili, Dr. Ir. A.M. Saefudin, Drs. M. Dawam Rahardjo, Drs. Hadi Mulyo, Dr. , dr. Ahmad Syafi’I Ma’arif, Drs. Kurniawan Zulkarnaen, Dr. Usman Pelly, M.A, Dr. Amir Syarifudin, Dr. Muhammad Fakri Gaffar, Dr. Tawang Alun, Dr. Saleh Syafradji, Ir. Murasa Sarkaniputra, Adi Sasono, Prof. Halide, Dr. Shalihuddin Djalal Tandjung, Ir. Moeslim Abdurrahman, Dr. Zamakhsyari Dhofier dan Dr, Koentowijoyo.¹⁰

Acara ini merupakan rangkaian dari usaha mempererat silaturahmi dengan para sarjana yang telah menyelesaikan studinya di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai berbagai pandangan, gagasan dan konsep mengenai masalah pembangunan nasional. Pertemuan ini diselenggarakan secara bersama antara Lembaga Pendidikan Penelitian Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Pusat Pengembangan Agribisnis (PPA), Universitas Islam Asy-Syafi’iyah (UIA), Universitas Ibnu Khaldun Bogor (UIKA), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Studi dan Filsafat (LSAF)¹¹ sebagai penyelenggara teknis pertemuan tersebut.¹²

¹⁰ A. Rifa’I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Op. Cit*, hlm. 9 dan 19-20

¹¹ Upaya membentuk wadah Cendekiawan Muslim kembali dirintis pada tahun 1984-1986 melalui Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) bekerjasama dengan MUI. Nama yang ingin digunakan adalah ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Tetapi upaya ini pun urung dari ‘dalam’ menyusul timbulnya perbedaan pendapat mengenai orang yang akan menjadi ketua umum. Kendati pun prosesnya sudah berjalan dua tahun, dan hanya berhasil menyepakati pembentukan Forum komunikasi Pembangunan Indonesia (FKPI). Pada tanggal 25-27 Juli 1986 di Ciawi Bogor, dalam lokakarya pertama FKPI, salah seorang pengurus Dr. Fuad Masyari, berkeras membentuk ICMI yang pernah dirintis, tetapi tidak mendapatkan respon antusias dari peserta.

Pertemuan Cendekiawan Muslim ini memiliki beberapa asumsi dasar yang diidentifikasi sebagai alasan, yaitu :

1. Gambaran tentang Islam yang sering tercermin lewat gambaran para penganutnya, mana yang tidak sesuai seluruhnya dengan tuntutan ajaran.
2. Gambaran kondisi obyektif dunia Islam yang masih dilanda kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan. Kondisi ini berhadapan langsung dengan pecepatan pembangunan ilmu pengetahuan, teknologi, pemupukan kapital di belahan dunia.
3. Penilaian yang berbeda-beda terhadap masalah diatas, maka perlu dilakukan usaha-usaha memberikan gambaran umum yang benar dan bernilai tentang Islam pada masyarakat.

Istilah Cendekiawan Muslim baru menjadi populer dikalangan yang lebih luas pada awal dasawarsa 1990-an. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa gejala itu berkaitan erat dengan kelahiran ICMI pada tanggal 7 Desember 1990 di Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur. Namun, buru-buru perlu dikemukakan catatan bahwa Cendekiawan Muslim sendiri sudah banyak disebut, khususnya di lingkungan pergerakan Islam, sejak awal tahun 1980-an. Pada waktu itu masyarakat mulai melihat sosok Cendekiawan Muslim dalam percaturan pemikiran dan perubahan kemasyarakatan. Maka timbullah acara-acara yang berpredikatkan ‘Pertemuan Cendekiawan Muslim’

Belakangan Dr. Fuad Masyari membentuk Cendekiawan Muslim al-Falah (CMF) di Surabaya dengan lingkup kerja dan gaung bersifat lokal. Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit*, hlm. 228-229.

¹² A. Rifa’I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Loc. Cit*, hlm. 9

di kampus-kampus. Pertemuan-pertemuan seperti itulah yang sering kali dimotori oleh mahasiswa¹³ yang akhirnya melahirkan ICMI.¹⁴

Berawal dari sebuah diskusi kecil bulan Februari 1990 di Masjid Kampus Universitas Brawijaya, sekelompok mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi umat Islam, terutama karena "berseraknya" keadaan cendekiawannya, sehingga menimbulkan polarisasi kepemimpinan di kalangan umat. Masing-masing cendekiawan muslim sibuk dengan kelompoknya sendiri, serta berjuang secara parsial sesuai dengan aliran dan profesinya masing-masing. Dari forum tersebut tercetus keinginan untuk menyelenggarakan semacam kegiatan yang bisa mempertemukan para cendekiawan muslim. Caranya adalah dengan menghadirkan mereka sebagai pembicara dalam suatu simposium. Tema simposium yang direncanakan adalah "Sumbangan Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas"; dengan ancar-ancar pelaksanaan tanggal 29 September - 1 Oktober 1990.¹⁵

Tanggal 28 September 1990, sejumlah cendekiawan muslim bertemu lagi dalam rangka persiapan simposium yang akan diselenggarakan bulan Desember. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membentuk tiga tim dalam rangka kelahiran ICMI, yakni kerangka acuan dan disain simposium (dikoordinasikan M. Dawam Rahardjo), Tim Anggaran Dasar (dikoordinasikan Muslimin Nasution), dan Tim Progam Kerja

¹³ Mahasiswa tersebut berjumlah lima orang, yaitu: Erik Salman, Ali Mudakir, Mohammad Zaenuri, Awang Surya dan Muhammad Iqbal. Mereka adalah mahasiswa fakultas teknik sipil angkatan 1987 dan bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Islam, Mesjid Raden Fatah Universitas Brawijaya Malang Jawa Timur. Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit*, hlm. 229

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 23.

¹⁵ www.icmi.or.id, *Detik Detik Kelahiran ICMI*, Rabu 5 Mei 2004

(dikoordinasikan Sri Bintang Pamungkas). Juga disepakati, simposium yang semula bertema "Sumbangsih Cendekiawan Muslim Menuju Era Tinggal Landas" diganti menjadi "Simposium Nasional Cendekiawan Muslim: Membangun Masyarakat Abad XXI". Penting untuk dikemukakan, dalam proses penyelenggaraan simposium serta pembentukan ICMI ikut dilibatkan pula sejumlah staf BPPT, antara lain Wardiman Djojonegoro, Marwah Daud Ibrahim, Komaruddin, Tasmian, dan lain-lain.¹⁶

Tanggal 25 - 26 November 1990, sekitar 22 orang cendekiawan yang akan membentuk wadah baru itu berkumpul di Tawangmangu, Solo, merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 1993 dan Pembangunan jangka Panjang Tahap Kedua 1993 - 2018 serta Rancangan Program Kerja dan Struktur Organisasi ICMI. Sementara di Jakarta, tim Anggaran Dasar sejak akhir September melaju dengan rancangannya, setelah digodok dalam beberapa kali pertemuan. Habibie kemudian berdialog dengan ketiga tim di kediamannya selama lebih kurang 7 jam.¹⁷

Suasana yang terjadi di Malang pada tanggal 6 - 8 Desember 1990, menandai dibukanya "lembaran baru" dalam sejarah umat Islam Indonesia dalam era Orde Baru. Presiden Soeharto sendiri yang membuka simposium, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan menabuh bedug sesuai irama ketika suara adzan hendak dikumandangkan, tanda bahwa waktu shalat sudah masuk. Simposium itu sendiri dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat tingkat pusat maupun daerah.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Abdul Aziz Thaba, *Loc.Cit*, hlm. 231

Di antara yang tampak hadir adalah Mensesneg Moerdiono, Pangab Jenderal TNI Try Sutrisno, Mendikbud Fuad Hassan, Menteri Agama Munawir Sjadzali, Menteri Penerangan Harmoko, Menteri KLH Emil Salim, Meteri Perhubungan Azwar Anas; dan juga mantan Menko Kesra Alamsyah Ratuperwiranegara, di samping pejabat-pejabat daerah. Juga penting untuk dicatat, penutupan simposium dilakukan oleh Wakil Presiden Soedharmono. Maka simposium cendekiawan muslim yang dilanjutkan dengan pembentukan ICMI di Malang itu memang sesuatu yang "istimewa" baik bagi pemerintah maupun umat Islam.

ICMI lahir ditengah suasana meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam dan melunaknya pemerintah Orde Baru terhadap perkembangan Islam. Peningkatan kesadaran umat Islam ditandai dengan meningkatnya jumlah orang yang naik haji, merebaknya pemakaian jilbab dikalangan siswi dan mahasiswi muslim serta pengajian Islam di kampus perguruan tinggi sekuler. Meningkatnya kegiatan sisial keagamaan ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah, NU, munculnya lembaga kajian Islam Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF). Yang lebih penting lagi bergairahnya kehidupan agama di kantor-kantor pemerintah dan swasta.¹⁸

Sebagai organisasi kebudayaan, ICMI bersifat keilmuan dan kecendekiawanan. Keilmuan menunjuk kepada cara atau prosesnya untuk mencapai tujuan sedangkan kecendekiawanan menunjuk kepada komitmen dan misinya sebagai Cendekiawan terhadap persoalan bangsa dan

¹⁸ Sudirman Tebba, *Loc.Cit*, hlm. 90

kemanusiaan. ICMI hanyalah sebuah wadah pengabdian kepada Allah SWT guna melaksanakan perintah-Nya dalam al-Qur'an,

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ... (آل عمران: 103)

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah (agama), dan janganlah kamu bercerai-berai. (QS Ali Imran: 103)”.¹⁹

Dalam konteks kemasyarakatan Indonesia, perintah itu diwujudkan dalam upaya ‘menggalang persatuan dan kesatuan bangsa’ dalam suasana persatuan dan kesatuan, Cendekiawan Muslim berperan secara lebih teratur dan sistematis dalam ikut memecahkan masalah-masalah yang strategis yang berskala lokal, regional, nasional dan global.²⁰

B. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dalam Dinamika Politik Islam Pra-Reformasi (1990-1998)

Tatkala W.S. Rendra menerima anugerah seni dari akademi Jakarta (1957) suatu kritik dan peringatan ia alamatkan kepada akademi tersebut, para budayawan dan Cendekiawan. Ia takut bahwa melembagakan mereka dalam suatu himpunan birokrasi akan dapat melemahkan atau bahkan mematikan fungsi kecendekiaan mereka. Cendekiawan, menurut Rendra tidak berbeda dengan ‘empu’ atau ‘pujangga’ yang tinggal di Padepokan yang umumnya diatas angin. Mereka adalah ‘penyeimbang’ fungsi raja yang tinggal di Kraton dalam membina kesejahteraan para kawula. Fungsi mereka akan berjalan

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Jumanatul ‘Ali Art, 2005, hlm. 63

²⁰ M. Dawam Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 72-73

dengan baik bila mereka berkarya di atas kedudukan dan singgasana masing-masing. Mengkratonkan Padepokan berarti kan menghilangkan kesaktian (kecendekiaan) para ‘empu’, dan pada saat itu bergeser lah esensi ‘empu’ menjadi Mangkubumi, Cendekiawan menjadi Teknokrat atau bahkan Birokrat.²¹

Dari perumpamaan W.S. Rendra, bahwa untuk eksis secara fungsional sebagai Cendekiawan akan banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang paling sering ialah institusi tempat Cendekiawan berkarya. Kendala kelembagaan mestinya ditafsirkan sebagai keterikatan dan keterbatasan Cendekiawan untuk melakukan karya kecendekiannya sehubungan dengan status yang ia miliki dalam lembaga pemerintah.²²

Latar belakang pembentukan ICMI karena umat Islam, khususnya cendekiawannya, merasa dipinggirkan dalam wacana nasional. Syiar Islam pun dihambat. Rangkaian peristiwa Tanjung Priok, Peristiwa Lampung, fitnah ihwal komando jihad mendahului pembentukan Organisasi Cendekiawan Muslim ini. "Sebelum ICMI ambil bagian secara wajar dalam wacana nasional, anak sekolah wanita dilarang mengenakan busana Muslim. Bahkan ada yang sampai dikeluarkan dari sekolah. Dulu, bagi mubaligh untuk berkhotbah pun harus memiliki surat izin mubaligh (SIM) dari kopkamtib.²³

ICMI yang lahir tanggal 7 Desember 1990 telah mampu memberikan warna kehidupan politik dan keagamaan di tanah air. Kehadirannya

²¹ A. Rifa’I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Loc. Cit*, hlm. 56

²² *Ibid*, hlm. 57

²³ Soetjipto Wirosardjono, *Masih Relevankah ICMI ?* (Artikel), www.icmi.or.id, Minggu, 02 Juli 2000.

memunculkan pro dan kontra ditengah masyarakat. Kelompok yang setuju dengan kehadiran ICMI berpendapat, adanya ICMI memberikan harapan bagi tumbuhnya semangat keberagamaan yang bersih dari firqoh-firqoh aliran aliran keagamaan. Kelompok ini juga berpendapat, ICMI mampu menjadi pemersatu umat. Sementara bagi mereka yang kurang sependapat dengan kelahiran ICMI berpendapat bahwa organisasi ini hanya akan menambah jumlah kelompok primordial sehingga membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mereka juga menuduh ICMI cenderung mempersubur sektarianisme dalam kehidupan berbangsa.²⁴

Banyak orang-orang Islam sendiri salah menafsirkan kehadiran ICMI. Dapat disebutkan diantaranya, ICMI hanyalah sebuah ‘kendaraan politik’ yang akan dimanfaatkan guna meraih kekuasaan. Pendapat demikian melahirkan guyonan sinis yang antara lain mengatakan bahwa ICMI merupakan ‘Ikatan Calon Menteri Indonesia’²⁵, atau ‘Ikatan Cendekiawan Muallaf Indonesia’.²⁶

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) diingatkan untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik, terutama dalam pro-kontra perebutan kekuasaan. ICMI justru harus berada di atas semua gerakan politik, untuk memberikan pesan moral dan etika kepada elit politik. Demikian dinyatakan Ketua Dewan Kehormatan ICMI yang juga mantan Presiden RI ke-3, Prof.

²⁴ Ahmad Bahar, *Loc.Cit*, hlm. 13-14

²⁵ Seperti diketahui, banyak menteri dan pejabat pemerintahan dalam Kabinet Pembangunan VI (seperti Adi Sasono-Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah) yang lebih dikenal sebagai tokoh ICMI ketimbang sebagai tokoh partai Islam atau ormas Islam lainnya. Boleh dibilang, dari sejumlah anggota kabinet yang ada itu sebagian besar agama Islam dan diantara mereka merupakan tokoh-tokoh ICMI. Akan tetapi hal ini tentu tidak dalam kalangan Islam sendiri, dalam kalangan non-Islam, organisasi cendekiawan Hindu, Budha, kristen dan Katolik juga tidak mampu mengirim anggotanya ke jabatan politik pemerintahan yang cukup berarti seperti halnya ICMI. *Ibid*, hlm. 14 dan 67.

²⁶ *Ibid*, hlm. 15

B.J. Habibie.²⁷ Tidak benar apabila ada keinginan membawa ICMI masuk dalam kerja politik.²⁸ ICMI harus berada di atas semua gerakan politik dengan program menyukseskan Pemilu 2004, ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ICMI dan Silaturahmi Akbar Cendekiawan Indonesia 2003. Untuk dapat menyukseskan Pemilu 2004 tersebut, menurut Habibie, perlu keterlibatan aktif dari kaum cendekiawan guna menyampaikan informasi kepada masyarakat. Cendekiawan harus peduli pada masyarakat dan lingkungannya.

ICMI lahir dari kaum santri modern perkotaan yang membutuhkan wadah dan keseimbangan baru dengan Islam, akibat Islam dipinggirkan dan umat Islam dinista pada era Orde Baru, yang bertujuan membangun bangsa yang bermartabat dan mandiri.²⁹ Maka yang mendahului kelahiran ICMI adalah perjalanan panjang umat Islam ditengah ‘badai politik’ yang tidak menginginkan ekistensi ‘Islam politik’. ICMI sendiri dalam batas kemampuannya telah melakukan fungsi integratif dilihat dari sudut pandang internal Islam, walaupun hal ini dinegasikan oleh kelompok penentangannya. Melalui wadah ICMI berbagai potensi Islam dipersatukan, timbul kesadaran saling berakomodasi antara berbagai ‘pusat sumber kekuasaan’ cendekiawan muslim.³⁰

²⁷ www.habibiecenter.or.id, 18/ 12/ 2003

²⁸ Menurut Suharnomo ber-ICMI merupakan bagian dari bersosial kemasyarakatan dan lembaga ICMI tidak mungkin berpolitik praktis. Jikalau ada kader ICMI berpolitik yang berorientasi kekuasaan itu karena faktor profesionalisme dan proporsional. ICMI hanya memainkan peran lebih kearah kemandirian dan martabat bangsa dibidang agama, sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

²⁹ Wawancara dengan Suharnomo, S.E., M.Si (Sekertaris Umum ICMI Orwil Jawa Tengah) pada tanggal 20 Nopember 2006 di kantor ICMI Orwil Jawa Tengah.

³⁰ www.habibiecenter.or.id, 18/ 12/ 2003, *Ibid*, hlm. 114

Sejak kelahirannya sampai saat ini, ICMI telah menimbulkan kritik, bahkan dari kalangan intern. Kritik itu pada umumnya mempersoalkan keterlibatan ICMI dalam politik praktis, pada dalam AD/ART disebutkan bahwa ICMI bukan organisasi sosial-politik. Sehubungan dengan hal itu, Syafi'i Anwar mencatat empat persoalan yang muncul, yaitu :³¹

1. Apakah ICMI bisa menghindarkan diri dari eksklusifisme kelompok dan semangat sektarian yang sempit karena komitmen yang bersifat 'ideologis dan primordial',
2. Bagaimanakah kaum Cendekiawan yang biasa berpikir bebas dan kritis itu bisa mengartikulasikan diri secara maksimal sesuai dengan misi kecendekiawanannya,
3. Persekutuan antara birokrasi dan Cendekiawan dengan subkultur kelas menengah sendiri tidaklah mudah,
4. ICMI sudah dinyatakan bukan organisasi politik, tetapi apakah mungkin Cendekiawan tidak berpolitik.

Menurut Din Syamsudin, pemerintahan Orde Baru melakukan 'depolitisasi' Islam melalui tiga cara, yaitu : (1) Menghapuskan simbol-simbol Islam dalam kegiatan politik. (2) Menghapuskan partai Islam. (3) Menghapuskan arena politik dari politisi Islam.³²

Melihat sejarah panjang tersebut, secara hipotesis muncul anggapan bahwa ICMI hanya mungkin terbentuk jika mendapatkan 'restu' pemerintah. Sementara 'restu' itu hanya turun jika ada kompensasi politis. Sehingga

³¹ Abdul Aziz Thaba, *Loc.Cit*, hlm. 332

³² Ahmad Bahar, *Loc.Cit*, hlm. 94

walaupun secara formal ICMI lahir dari bawah, sulit menghindari masuknya ‘arus atas’. Inilah yang membuat demikian beragamnya aspirasi politik, peranan, tingkat keberagaman, aliran teologis dan komitmen terhadap cita-cita kemajuan Islam dikalangan anggota ICMI.³³

ICMI yang didirikan atas restu dari Presiden Soeharto. Meskipun ICMI adalah anak kandung orde baru, namun pada saat pendiriannya dalam internal ICMI tersebut terjadi perbedaan pemahaman, terutama yang terkait dengan paradigma yang akan diusung oleh ICMI kedepan. Ada tiga kelompok yang memiliki pandangan berbeda di tubuh ICMI,³⁴ *pertama*, kelompok “Islam Kultural”. Kelompok ini menginginkan ICMI tetap sebagai organ yang independen dari kepentingan politik. Mereka mengusulkan agar ICMI tidak menarik kepentingan politik kedalam organisasi tersebut.

Kedua, kelompok yang berasal dari kalangan muslim modernis. Mereka mengharapkan ICMI akan berperan sebagai pembimbing dalam membenahi etika. Tetapi mereka menyuarakan kepentingan-kepentingan yang bersifat politis jangka panjang. Karena dalam pandangannya, ketika etika manusia sudah dibenahi, maka seluruh aspek kehidupan termasuk konstelasi politik dengan sendirinya akan berjalan pada tataran normatifnya.

Ketiga, kelompok yang terdiri dari para aktivis prodemokrasi yang mempercayai bahwa ICMI merupakan organisasi yang kental dengan nuansa militerisasi. Namun, mereka sendiri sebenarnya sulit untuk merubah patron yang demikian kuat.

³³ Abdul Aziz Thaba, *Ibid*, hlm. 229

³⁴ Tedi Kholiludin, *ICMI masikkan menjadi Intelektual Tukang ?* (Artikel), Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 105/ Januari-Februari 2006, hlm. 20

Jika "terpaksa" ICMI harus bermain di ranah politik, maka yang perlu dimainkan adalah membangun kesadaran berpolitik masyarakat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah. Tidak lagi zamannya, jika ICMI bersikap elitis, eksklusif, jauh dari komunitas marginal. Sangat zalim bagi ICMI yang merupakan organisasi cendekiawan muslim jika untuk peduli saja tidak apalagi bertindak yang terbaik terhadap kaum duafa.³⁵

C. Gerakan Politik Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada Era Reformasi (1998 – 2005)

Muhammad Arif Furqon, dalam penelitiannya memahami pandangan dan sikap anggota-anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Surabaya. Dalam konteks perubahan politik pasca rezim Soeharto. Penelitian ini terinspirasi oleh kenyataan bahwa sepanjang tahun 1990-an, ICMI menjadi fenomena politik yang sangat menarik. Ini karena sejak berdirinya mendapat dukungan yang sangat besar dari pemerintah. Oleh karena itu ICMI menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dalam perpolitikan nasional. ICMI menjadi saluran efektif bagi individu atau kelompok untuk mendapatkan kekuasaan.³⁶

Tetapi kejayaan itu tidak berlangsung lama, karena Soeharto akhirnya harus mundur akibat desakan gerakan reformasi tahun 1998. Sejak saat itu

³⁵ Nurudin, *Ke Mana Bahtera ICMI Berlayar ?* (Artikel) H.U. Suara Merdeka, Selasa, 19 September 2006, hlm. 5

³⁶ Muhammad Arif Furqon, *ICMI Masa Reformasi: Studi Kasus Respon Anggota – Anggota ICMI Surabaya terhadap Perubahan Politik Pasca Rezim Soeharto sampai dengan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid*, library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id; Post Graduate Airlangga University, 07 April 2004.

pamor ICMI menjadi redup, perlakuan pemerintah terhadap ICMI tidak lagi seperti sebelumnya, meskipun Habibie, yang nota-benanya adalah Ketua Umum ICMI, menggantikannya sebagai presiden.³⁷

Dari hasil penelitian ini nampak bahwa pasca rezim Soeharto. ICMI mengalami penurunan peran dan pamor dalam kancah politik nasional akibat berkurangnya dukungan negara terhadap organisasi ini. Tetapi tidak secara otomatis ICMI hilang, sebab ada anggota anggota ICMI yang memahami ICMI tidak sekedar sebagai kendaraan politik untuk kepentingan politik yang bersifat pragmatis.

"Bagaimanapun ICMI punya andil dalam reformasi," Pada gilirannya catatan tentang jejak perjuangan ICMI itu perlu diungkap secara lengkap dan adil. Dalam tempo lebih dari lima belas tahun (mulai muktamar I – IV) ICMI sukses membangkitkan perubahan, yang pada gilirannya memicu momentum reformasi sampai masa sekarang.

NO	MUKTAMAR	TANGGAL	TEMPAT	KETUA TERPILIH
1.	Muktamar I	6-8 Desember 1990	Kota Malang	Baharuddin Jusuf Habibie
2.	Muktamar II	7-9 Desember 1995	DKI Jakarta	Baharuddin Jusuf Habibie
3.	Muktamar III	9-12 November 2000	DKI Jakarta	Adi Sasono
4.	Muktamar IV	4-7 Desember 2005	Kota Makassar	Marwah Daud Ibrahim (Ketua Presidium)
<i>Sumber : www.habibiecentre.or.id</i>				

³⁷ *Ibid*

Menjelang muktamar III ICMI pada tanggal 9-12 Desember 2000 timbul pemikiran yang bernada pesimistis terhadap masa depan organisasi Islam ini. Misalnya timbul pendapat yang menganggap bahwa peran ICMI sudah tidak jelas, setelah mantan ketua umumnya B.J. Habibie tidak lagi di puncak kekuasaan. Posisi ICMI saat ini memang berbeda sekali dengan waktu kelahirannya. Waktu ICMI lahir dan sekaligus menyelenggarakan muktamarnya yang pertama pada 7 Desember 1990, peran ormas Islam ini kelihatannya sangat besar. Terutama karena ketua umumnya B.J. Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), kemudian menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI yang ke tiga.³⁸

Namun setelah Habibie tidak lagi berkuasa seolah-olah peran ICMI ikut surut dan menjadi tidak jelas. Pandangan ini ada benarnya jika ICMI hanya dilihat perannya dalam perkembangan politik Indonesia. Artinya peran politik ICMI sudah pudar. Tetapi memandang ICMI tentu saja tidak bisa hanya semata-mata dari segi politik, yang lebih penting justru sosial keagamaannya. Program kerja ICMI Jawa Tengah yang telah dilaksanakan dan menjadi rutinitas diantaranya adalah :³⁹

1. **Bidang Keagamaan** yaitu bertekad membentengi penyebaran Islam liberal dan paham-paham lain yang terindikasi merusak ukuwah ummat.
2. **Bidang Pendidikan** yaitu melalui badan otonom Orang Tua Bimbingan Terpadu (ORBIT) ikut serta menyukseskan pemerataan pendidikan,

³⁸ Sudirman Tebba, *Loc. Cit*, hlm. 89

³⁹ *Executive Summary* Program ICMI Jawa Tengah, disampaikan dalam acara Audiensi ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto, Semarang tanggal 2 Oktober 2006.

dengan memberikan beasiswa dari dana abadi yang dikumpulkan pengurus ICMI. ORBIT ICMI telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 12.000 siswa dari jenjang SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

3. **Bidang Politik** yaitu bertekad menyukseskan proses demokratisasi lokal Jawa Tengah sebagai benchmark bagi proses demokratisasi di daerah-daerah di Indonesia.
4. **Bidang Ekonomi** yaitu telah melakukan karya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan cara memberikan akses luas permodalan bagi kalangan tidak mampu. Tumbuh suburnya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang sekarang sudah lebih dari 300 buah di Jawa Tengah, adalah bukti bergulirnya program pengembangan lembaga keuangan mikro yang banyak digawangi ICMI.

Adi Sasono melaporkan dalam salah satu rapat pengurus pusat, di samping mencatat adanya kegalauan (*disillusion*) yang merata diantara aktivis ICMI, ia juga dengan sedih mencatat bahwa penjelasannya ihwal peran dan kontribusi nyata ICMI dalam proses dan prestasi nyata reformasi, di bidang hukum, politik dan HAM ternyata dikalahkan begitu saja oleh persepsi meluas, yang telanjur tertanam di benak dan cara pandang sebagian besar eksponen ICMI sendiri. Lebih lanjut Adi Sasono menambahkan, organisasi ini bagi sementara tokoh terdepan ICMI, tak lain dari sekadar 'kendaraan politik' buat numpang terbawa dalam perubahan. "Bukankah ICMI, bagi sementara kalangan dijuluki sebagai Ikatan Calon Menteri Indonesia".⁴⁰

⁴⁰ Sudirman Tebba, *Op.Cit*, hlm. 89

Pertanyaan provokatif itu diucapkan oleh Sekretaris Umum ICMI, Adi Sasono, di tengah kegalauan sebagian anggota serta simpatisan ICMI ketika menghadapi derap perubahan wacana politik memasuki era reformasi ini. Adi Sasono tidak mengada-ada dalam mengungkap konstalasi getir itu. Selaku Sekretaris Umum ICMI, ia melakukan perjalanan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, guna menemui eksponen ICMI pada tingkat organisasi wilayah (di ibu kota provinsi umumnya atau ibu kota negara lain); maupun bertemu para aktivis ICMI tingkat organisasi satuan di ibu kota kabupaten dan kotamadya.⁴¹

Menurut Adi Sasono mengenai perlunya ICMI steril dari aktivitas politik praktis adalah jangan sampai ICMI terlibat dalam pro kontra perebutan kekuasaan. Karena sebagai institusi ICMI harus memikirkan bangsa secara keseluruhan. Akan tetapi, kader-kader ICMI memiliki hak dan kewajiban untuk terjun ke kancah politik dalam rangka pergulatan penyusunan kebijakan publik. Kalau kaum cendekiawan tidak masuk dalam proses kebijakan publik, masa penyusunannya diserahkan kepada mereka yang tidak memahami dan tidak memiliki latar belakang keilmuan? Nanti kebijakan publik justru bisa menimbulkan masalah, ujar mantan Menteri Koperasi itu.⁴²

⁴¹ Soetjipto Wirosardjono, *Op.Cit*, hlm. 2

⁴² Wawancara dengan Adi Sasono pada tanggal 5 September 2006 Di IAIN Walisongo Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rifa'I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa; Pertemuan Cendekiawan Muslim Pertama*, Jakarta; PLP2M, Cet. I, 1987
- Executive Summary* Program ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto, Semarang tanggal 2 Oktober 2006.
- Furqon, Muhammad Arif, *ICMI Masa Reformasi: Studi Kasus Respon Anggota – Anggota ICMI Surabaya terhadap Perubahan Politik Pasca Rezim Soeharto sampai dengan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid*, library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id; Post Graduate Airlangga University, 07 April 2004.
- Hikam, Muhammad A.S., *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, Cet. I, 2000
- H.U. Suara Merdeka, Selasa 19 September 2006
- Madjid, Nurcholis, *Islam dan Politik Modern*, <is-lam@isnet.org>, Rabu 10 Agustus 2000.
- Nurudin, *Ke Mana Bahtera ICMI Berlayar ?* (Artikel) Selasa, 19 September 2006
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa; Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung; Mizan, Cet. IV, 1999
- Sasono, Adi, Wawancara pada tanggal 5 September 2006 Di IAIN Walisongo Semarang.
- Suharnomo, S.E., M.Si (Sekertaris Umum ICMI Orwil Jawa Tengah) Wawancara pada tanggal 20 Nopember 2006 di kantor ICMI Orwil Jawa Tengah.

- Kholiludin, Tedi, *ICMI masihkan menjadi Intelektual Tukang ?* (Artikel),
Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 105/ Januari-Februari
2006
- Wahid, Abdurrahman, *Birokratisasi Gerakan Islam* (Artikel), Kompas, 30
Agustus 2006
- Wirosardjono, Soetjipto, *Masih Relevankah ICMI ?* (Artikel), www.icmi.or.id,
Minggu, 02 Juli 2000
- www.habibiecenter.or.id, 18/ 12/ 2003
- www.icmi.or.id, *Detik Detik Kelahiran ICMI*, Rabu 5 Mei 2004

BAB IV

ANALISIS GERAKAN POLITIK ICMI PADA ERA REFORMASI

(1998 – 2005)

A. Peran ICMI dalam Dinamika Politik Islam Pra-Reformasi

Gerakan Islam sering diidentifikasi dengan organisasi massa Islam. Padahal secara hakiki kedua pengertian itu tidak selalu sama. Gerakan Islam memiliki *mabda* (Prinsip), *Uslub* (metode), *marhalah* (tahapan), *ghayah* (tujuan) yang tidak selalu pas dengan organisasi massa Islam.¹

Gerakan Islam lebih menitikberatkan dirinya pada terciptanya aqidah dan fikrah umat yang sempurna terhadap Islam, untuk mencapai suatu masyarakat yang benar-benar diridhoi Allah SWT, bergerak maju seiring dengan dan berlandaskan perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW.²

Gerakan Islam memang menjadi suatu keharusan, yang diharapkan dapat menjadi alat membentukkan masyarakat yang dijiwai nilai-nilai Islam. Gerakan Islam yang berlangsung sepanjang masa akan mampu mengontrol jalannya kehidupan masyarakat secara dinamis dan konsisten. Dengan kata lain, pergerakan Islam ini akan membentuk peradaban Islam.

Sering kali orang bertanya, kenapa agama dibawa-bawa kedalam politik, atau sebaliknya ? Pertanyaan ini timbul karena seringkali orang mengartikan bahwa yang dinamakan agama itu, hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan YME. Definisi ini mungkin

¹ A.M. Saefuddin, *Ijihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996, hlm. 67

² *Ibid*, 67-68

tepat bagi bermacam-macam agama, akan tetapi tidak tepat bagi agama Islam, yang hakikatnya nyata adalah lebih dari itu.³

Seorang orientalis, H.A.R. Gibb, berkata ”*Islam is much more than a religious system, it is a complete civilization*” Islam itu adalah lebih dari sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan / peradaban yang lengkap dan sempurna.⁴

Bangkitnya paham Islam sebagai gagasan dan platform politik juga perlu diberi catatan. Kebangkitan ini sebenarnya sudah mulai ketika B.J. Habibie dan ICMI-nya pada periode 1990-an bergerak masuk dan mendominasi birokrasi sipil dan mengkooptasi birokrasi militer.⁵ Kekuatan ICMI dan ide yang diusungnya memang besar, dan masih tetap berpeluang untuk memainkan peran politiknya dimasa depan. Kehadiran ICMI telah merubah wajah negara, juga wajah pemerintah. Dengan menguasai birokrasi sejak awal 1990-an, sedikit banyak ICMI telah melakukan sejumlah perubahan fundamental dan struktural pada berbagai bidang, terutama bidang politik dan pemerintahan.⁶

ICMI mulai membangun hubungan kemitraan baik dengan pemerintah maupun militer. Ada harapan besar dikalangan umat melauai ICMI, kaum muslim akan mengalami proses mobilitas sosial, hal ini nampak menyolok

³ *Ibid*, hlm. 177

⁴ *Ibid*

⁵ Isu penghijauan kabinet yang muncul pada pemilu tahun 1992, merupakan salah satu indikasi rasa traumatic akan kebangkitan kelompok Islam. Majalah SANTRI, *Merenungkan Gagasan Negara Islam*, Surabaya, Nopember 1997, hlm 7

⁶ John Pieris, *Tragedi Maluku; Sebuah Krisis peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004, hlm. 157.

terutama dalam banyaknya orang Islam yang duduk dalam kekuasaan.⁷ Berkembangnya ICMI dikalangan cendekiawan yang umumnya berada di lembaga pemerintah dan swasta sebagai basisnya melahirkan dan meningkatkan kesadaran baru dalam keberagaman umat Islam. Sehingga dapat mengembangkan etika dan etos sebagai bagian penting dalam menjalankan peran sosial keagamaan.⁸

Kelahiran ICMI dari rahim Orde Baru, bukannya tanpa sebab dan tujuan. Bachtiar Effendi melihat bahwa pendirian ICMI ini tidak lain sebagai bentuk pengakomodiran terhadap komunitas muslim yang saat itu menjadi kekuatan yang berperan sangat signifikan dalam pembangunan bangsa. Pengakomodiran berbagai bentuk kepentingan politik umat Islam ini dikenal dengan Teori Akomodasi yang dicetuskan oleh Bachtiar Effendi, yang meliputi empat ranah, yaitu :⁹

1. Dalam wilayah structural, pemerintah memasukan nama aktivis Islam dan cendekiawan muslim ke dalam birokrasi, baik di eksekutif maupun legislatif. Dan puncaknya adalah dengan didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang diketuai oleh B.J Habiebie.
2. Akomodasi legislatif dengan ditetapkannya berbagai regulasi yang mengatur pola keberagaman umat Islam. Seperti UU No. 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional, UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

⁷ Eko Prasetyo, *Membela Agama Tuhan; Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, Jogjakarta: INSIST Press, 2002, hlm. 86

⁸ Sudirman Tebba, *Loc.Cit*, hlm. 92-93

⁹ Tedi Kholiludin, *Loc.Cit*, hlm.

Islam (KHI), dihapuskannya Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB), dan keputusan menteri mengenai Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh.

3. Akomodasi kultural, yaitu dengan populernya bahasa-bahasa agama seperti cendikiawan muslim, atau ucapan assalamu‘alaikum yang populer ketika Presiden Soeharto berkuasa. Juga safari Ramadan yang diprakarsai Menteri Penerangan Harmoko.
4. Akomodasi Infrastruktur, seperti dibangunnya Mesjid Istana Negara, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Majelis Ulama Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia.

Selain strategi-strategi di atas, agar politik Islam tetap eksis dalam sejarah perpolitikan di Indonesia¹⁰, maka strategi yang dipilih adalah dengan mengembangkan politik Islam melalui jalur kultural (budaya) dan penekanan upaya membangun kapasitas politik masyarakat melalui strategi “Islamisasi masyarakat dalam negara nasional”.

Berbagai program yang dicanangkan oleh ICMI telah banyak pula yang terealisasi. ICMI sudah berhasil melaksanakan sejumlah program yang membawa kemaslahatan ummat, seperti : Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang diikuti oleh pembentukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syari’ah dan Bait al Maal wa at Tamwil (BMT), untuk pengembangan BMT telah pula dioperasionalkan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK).¹¹

¹⁰ Menurut K.H. Jusuf Hasyim, dewan pakar ICMI mengatakan bahwa umat Islam itu harus sadar dan berani meluruskan sejarah, tugas seluruh ormas Islam, termasuk ICMI adalah untuk meluruskan sejarah, terutama penulisan dan ekspose sejarah yang sangat merugikan Islam. Majalah UMMAT: No. 5/ Thn C/ 4 September 1995 – 8 Rabiul Akhir 1416 H, hlm. 35.

¹¹ A. Makmur Makka, *Loc. Cit*, hlm. 111

Kiprah ICMI semakin berkibar, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1992 terbentuknya Yayasan Abadi Bangsa. Yayasan ini didirikan oleh 45 orang, dengan pelindungnya adalah H.M. Soeharto dan penasehatnya Soedarmono serta Umar Wirahadikusuma. Dalam akte pendiriannya, yayasan tersebut bertujuan membantu dan mendukung ICMI dengan cara menghimpun, mengelola dan mendukung dana bagi program-program yang menyokong ICMI dalam mengusahakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan umat.¹² Melalui yayasan tersebut, diterbitkan pula harian *Republika*.¹³

Majelis Sinerji Kalam serta Adi Sasono dengan CIDES-nya, bergerak untuk mempromosikan Hak Asasi Manusia. Seminar pertama tentang HAM di Indonesia diselenggarakan oleh ICMI di Jalan Kebon Sirih, Jakarta, dan dibubarkan polisi karena 'tanpa izin'. Sejak itu, wacana tentang HAM terus bergulir hingga pemerintah mendirikan Komnas HAM. Dengan gerakannya tersebut, lingkaran ICMI bukan hanya berbuat untuk umat, namun untuk seluruh bangsa. ICMI membuat umat lega dengan kelahiran Bank Muamalat, Asuransi Takaful, Harian *Republika*, hingga Baitul Mal wa Tamwil (BMT) yang tersebar di berbagai wilayah. Lebih dari itu, ICMI juga membuat kaum

¹² Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit*, hlm. 299

¹³ Kehadiran ICMI dengan media merupakan sebuah kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan, dalam rangka pembentukan opini publik yang seimbang. Ketika *Republika* belum muncul, dan kehadiran ICMI duhujat oleh banyak pihak dengan tuduhan sektarianis, primordialis dan segala macam potret yang tidak mengenakkan. Bagaimanakah komponen ICMI menjelaskan visi dan misi mereka kalau tidak memiliki media sendiri ? Maka, tentu saja sangat dirasakan adanya kebutuhan untuk membentuk media massa yang sangat representatif. Afan Gaffar, *Loc. Cit*, hlm. 140

'santri' bisa diterima secara wajar di pusat kekuasaan, sebagaimana anak bangsa lain.¹⁴

Kehadiran ICMI boleh diartikan sebagai bangkitnya kalangan intelektual, terutama dalam peta kekuatan sosial politik di Indonesia. Namun tokoh NU Chalid Mawardi mempertanyakan, apakah lahirnya ICMI bukan merupakan lebih sebagai rekayasa politik. Kalau lahir atas dasar rekayasa, maka perhimpunan ini akan menjadi eksklusif dan mungkin akan mengalami delegitimasi dimata masyarakat. Kalau ICMI mau berpolitik, lebih baik para anggotanya bergabung saja dengan organisasi sosial politik yang sudah ada atau membentuk partai baru.¹⁵

Kader-kader ICMI menguasai hampir seluruh strata eselon atas. Dengan begitu maka konsep politiknya dapat dilaksanakan tanpa perlawanan yang berarti dari kelompok politik maupun entitas sosial dan kultural lain. ICMI juga dengan leluasa bisa memperkuat basisnya dalam masyarakat serta memberdayakannya secara optimal untuk kepentingan jangka panjang.

Ahli sejarah LIPI, Abdurrahman Suryomiharjo, berpandangan hampir mirip dengan Chalid Mawardi, kalau ICMI merupakan himpunan Cendekiawan, maka mereka harus berani menyuarakan masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan berdasarkan kecendekiawanannya. ICMI harus membuktikan diri sebagai barisan Cendekiawan dan bukan barisan politik. Oleh karena itu Cendekiawan dalam perhimpunan itu harus berani memberitahukan adanya kekurangan-kekurangan dalam politik praktis.

¹⁴ www.icmi.or.id, Rabu, 30 Nopember 2005

¹⁵ A. Makmur Makka, *Loc.Cit*, hlm. 31

Amin Rais dan Yahya A. Muhaimin, mengatakan bahwa salah satu alasan rasional kelahiran ICMI adalah keprihatinan yang saat ini di Indonesia belum ada satu kelembagaan yang menghimpun Cendekiawan muslim dari berbagai bidang profesi maupun berbagai latar belakang. Keberadaan ICMI terasa semakin sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan ummat Islam dibidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).¹⁶

Dalam masuknya organisasi ICMI dalam kerangka kerja negara dan mengkooptasi pemimpinnya, Orde Baru ibarat melempar dua burung dengan satu-satu. Dia berhasil membelokkan kritik-kritik potensial dari berbagai kelompok Islam dengan melihat politik-politik Islamnya. Pada waktu yang sama, Orde Baru yang meluluhkan kekuatan-kekuatan oposisi yang ada diantara kelompok-kelompok Islam. Banyak tokoh garis keras Islamis yang mentransformasikan dirinya menjadi pendukung-pendukung Soeharto dan akhirnya menjadi pembela-pembela Soeharto atas serangan gencar para pengkritiknya.¹⁷

Setelah rezim Soeharto tumbang, ICMI pun mulai kehilangan *elan*-nya. Meskipun demikian tidak sedikit kadernya yang saat ini masih terus berperan diberbagai partai politik, terutama yang seasas dan seperjuangan dengan ICMI. Dapat dipastikan ICMI dengan wajah baru akan muncul lagi dipanggung politik nasional. Bisa jadi dalam bentuk partai politik yang mengintegrasikan faham kebangsaan dan keislaman, atau mungkin tercipta

¹⁶ *Ibid*, hlm. 36

¹⁷ Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1999, hlm. 79

mainstream baru yang memadukan unsur-unsur nasionalisme dan spiritualisme.¹⁸

Banyak sekali kemudahan yang telah diberikan oleh rezim Orde Baru setelah berakhirnya era penindasan Islam. Sebagai puncaknya adalah pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Ini merupakan tanda kebangkitan politik Islam yang paling berarti. Dengan demikian, jelas kemunculan ICMI merupakan keuntungan tersendiri bagi Politik Islam dan telah mengubah corak hubungan Islam dan Negara. Namun kemunculan ICMI ini menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan Islam maupun non-Islam.¹⁹

Sementara itu penyebab munculnya kesalahpahaman dikalangan Islam juga cukup beragam. Menurut Deliar Noer dan Ridwan Saidi misalnya, mengatakan bahwa pembentukan ICMI yang memperoleh dukungan dari presiden tak lebih hanya sebagai sarana terpilihnya kembali jabatan Presiden.²⁰ Dan bagi mereka yang setuju dengan ICMI berpendapat bahwa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 158. Pembentukan partai-partai Islam bertambah momentumnya dengan penghapusan Undang-Undang tahun 1985 yang mewajibkan semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya dasar ideologi organisasinya. Hal demikian berakibat pula terhadap dinamika politik umat Islam berupa terjadinya ledakan partisipasi politik serupa, dengan penyikapan yang berbeda. Sebagian dengan cepat menyimbolisasi Habibie dan pemerintahannya sebagai representasi Islam politik dan dengan alasan itu, mereka mendukungnya hampir tanpa reserve. Sebagian lain memanfaatkan suasana reformasi pasca-Soeharto sebagai momentum sejarah termasuk merevitalisasi kritisisme dan *bargaining position* (daya tawar politik Islam) Kuntowijoyo, *Agenda Umat Islam Era Reformasi*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. 21.

¹⁹ Melalui ICMI memang muncul tabiat baru politisi muslim, yakni menukar politik prinsipil-konfrontatif yang dijalankan secara piawai oleh kaum negarawan di tahun 1950-an dengan prinsip politik yang pragmatis. Ongkos untuk itu teramat mahal, bahkan efeknya dapat dirasakan hingga saat ini. Eko prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 88.

²⁰ Ahmad Bahar (ed), *Loc.Cit*, hlm. 23.

dengan adanya ICMI mampu menjadi pemersatu umat, yang dengan itu akan mempercepat proses pembangunan bangsa.²¹

Menurut John Pieris, cukup memberikan gambaran objektif, khususnya mengenai kehadiran dan peran ICMI. ICMI memang telah memainkan peran penting dalam konstalasi politik lokal dan nasional. Pergeseran-pergeseran kekuasaan eksekutif ikut ditentukan oleh ICMI secara nasional.²²

Untuk mewujudkan visi dan misi, ICMI juga melakukan kegiatan intelektual melalui organ utama ICMI seperti Organisasi Satuan (Orat) dan Organisasi Wilayah (Orwil), maupun lembaga otonom seperti *Centre for Information and Decelopment Studies* (CIDES) dan Majelis Sinergi Kalam (Masika) yang dikelola oleh generasi muda ICMI. Kegiatan tersebut berupa seminar nasional maupun internasional, penelitian dan penerbitan majalah (Ummat, Sintesa, Fokus, Khasanah) dan koran *Republika* yang merupakan kegiatan kecendekiawanannya.²³

B. Gerakan Politik ICMI dalam Politik Islam pada Era Reformasi

Di era reformasi, terutama setelah adanya kebebasan politik Islam mengalami kebangkitan. Ada perubahan yang signifikan dari kelompok Islam dalam memaknai jatuhnya rezim Orde Baru, yang mulai mengakomodasikan aspirasi Islam. Naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden ketiga menggantikan

²¹ *Ibid.*

²² John Pieris, *Op.Cit*, hlm. 168

²³ Fahamsyah Teja Yuhana, *Op.Cit*, hlm. 51

Soeharto, membuat ICMI semakin dekat dengan kekuasaan dan menjadikan ICMI mempunyai kekuatan politik yang besar dan menentukan.

Keberadaan ICMI tidak bisa disangkal ikut memainkan peran politik umat Islam. Akan tetapi di era reformasi ini peran itu makin menyusut, karena sudah banyak partai Islam yang tampil memperjuangkan kepentingan umat Islam. "ICMI di era reformasi sekarang ini adalah sebagai perekat internal umat Islam Indonesia," Demikian dikatakan Ketua ICMI Pusat Prof Dr Jimly Ashidiqie.²⁴

Drs. Arbi Sanit, pakar politik Universitas Indonesia mengatakan, sejak terjang ICMI jelas menunjukkan keterlibatannya dalam politik praktis. Hal ini nampak dalam 'penghijauan' MPR 1993-1998, kabinet pembangunan VI dan pengurus Golkar²⁵. Karena B.J Habibie adalah Ketua Umum ICMI langsung dikaitkan dengan dinamika dan manuver politik ICMI. Seperti halnya, terpilihnya H. Harmoko, menurut A. Makmur Makka, lebih dilihat sebagai sekenario kerjasama imbal balik antara B.J. Habibie sebagai seorang ICMI, dan H. Harmoko yang bakal menjadi Ketua Golkar. Sehingga akan dapat dengan mudah memperoleh akses dalam kepengurusan Golkar. Hal ini tiada lain merupakan bagian dari strategi besar untuk merangkul kembali umat Islam dalam sejarah politik Indonesia.²⁶

²⁴ Kompas, *Peran Politik ICMI Surut*, Senin, 12 Februari 2001

²⁵ Prof. Dr. Habibie tampil sebagai Ketua Tim Formatur yang berhak menentukan kepengurusan Golkar. Hasil kerja formatur menghasilkan keanggotaan DPP Golkar 1993-1998 berjumlah 45 orang. Tokoh-tokoh ICMI yang tercantum namanya antara lain : H. Ismail Hasan, H. Kafrawi Ridwan, Hj. Marwar Daud Ibrahim, Fahmi Idris, Fadel Muhammad dan Dr. M. Syamsuddin. Sehingga *ijo royo-royo* di Senayan berlanjut ke Golkar. Abdul Aziz Thaba, *Loc. Cit*, hlm. 301

²⁶ A. Makmur Makka dan Dhurorudin Mashad, *Loc. Cit*, hlm. 67-68, Hal ini terlihat juga dengan banyaknya anggota ICMI yang diangkat oleh B.J. Habibie menjadi Menteri dalam Kabinet

Motivasi lain, Rhoma Irama menyebut terbentuknya organisasi ICMI dan maraknya kehidupan beragama di tiga jalur, jalur A (ABRI), jalur B (Birokrasi), dan jalur G (Golkar). Soal ICMI, misalnya, Rhoma mengandaikan, bahwa dengan sepuluh cendekiawan muslim yang dimiliki sudah pasti akan berbuat banyak. "Apalagi kalau seluruh cendekiawan muslim bergabung dalam wadah yang disebut ICMI. Saya melihatnya sebagai anugerah dari Allah SWT yang sangat besar," kata Rhoma kala itu.²⁷

Reformasi boleh dikatakan merupakan hasil usaha bersama antara kelompok nasionalis (*abangan*) dan Islam (santri) dengan tema sentral Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketika Habibie disahkan sebagai Presiden menggantikan Soeharto, mereka ramai-ramai menolaknya dan menganggapnya tidak konstitusional. Padahal, penyebab sebenarnya adalah karena mereka tidak suka apabila elit santri dalam ICMI mengisi kekosongan pemerintahan pasca-Soeharto.²⁸ Tampaknya, sesudah masa Soeharto (Orba), Islam masih mencari jati dirinya, terutama dalam politik. Masa Soeharto memang telah menyingkirkan kalangan Islam dari perpolitikan resmi.²⁹

Bagaimana dengan ICMI ? salah satu poin yang harus disepakati oleh semua pengamat mengenai organisasi cendekiawan ini adalah isu³⁰ mengenai

Reformasi (diantaranya Adi Sasono menjadi Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah). John Pieris, *Loc.Cit*, hlm. 168

²⁷ Kompas, Rhoma Irama, *Masuk Golkar karena "Lillahi Ta'ala"*, Jakarta, 29 April 1997

²⁸ Anwar Haryono, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, hlm. 83

²⁹ Republika, 12 April 2000, hlm.10.

³⁰ Isu yang menurut cukup *nyambung* dengan gerakan ICMI adalah pemberdayaan *civil society*. Sebagai kumpulan cendekiawan, ICMI tentunya, diperlukan oleh banyak pihak, terutama elemen masyarakat untuk melakukan pemberdayaan. Ini cukup penting untuk disuarakan mengingat di negara Indonesia, peran untuk melakukan pemberdayaan masih banyak dilakukan atas nama hegemoni dan dominasi. Muhammad A.S. Hikam, *Op.Cit*, hlm. 60. Namun yang

rujuknya kembali Islam dan negara. ICMI dianggap mewakili rekonsiliasi itu. Apalagi disana banyak berkumpul para figur masa lampau yang dikenal sangat ‘keras’ sikapnya kepada negara Orde Baru. Mereka berubah menjadi ‘lunak’ setelah masuk organisasi Cendekiawan tersebut. ICMI juga dianggap sebagai wadah yang menampung arus deras dari kebangkitan Islam yang selama ini tercecer di ‘trottoar politik nasional’.³¹

Wadah Cendekiawan memang telah memperlihatkan kemampuannya dalam mendinamisasi transpormasi budaya dikalangan umat Islam, sesuai dengan cita-cita awal dibentuknya ICMI. Namun sayangnya, ICMI belum bisa mandiri dan masih numpang pada kekuasaan serta lebih sebagai subordinat birokrasi pemerintah. Untuk masa berikutnya, ICMI haruslah berusaha mencegah dirinya dari orientasi yang bersifat massa dan politik.

ICMI haruslah berupaya untuk menjadikan dirinya benar-benar menjadi gugusan elite yang berfikir mengenai masalah-masalah strategis hingga bisa mendinamisasi transformasi budaya umat Islam Indonesia. Jadi ICMI sesungguhnya tidak jauh beda dengan organisasi Islam besar lain, seperti NU dan Muhammadiyah yang menempatkan agendanya dibawah ‘kolom’ negara bangsa.

dikhawatirkan Emha Ainun Najib, isu ICMI dijadikan sebagai ‘kendaraan politik’ itulah yang justru gencar muncul sejak kelahiran ICMI. Bahkan bukan saja gencar dilancarkan barisan yang berseberangan dengan ICMI, sementara orang yang berkiprah di ICMI pun dalam perkembangannya ternyata pula akhirnyan ikut-ikutan menuduh ICMI berpolitik. Dan oleh sebab itu mereka mengajukan semacam ‘otokritik’ kepada organisasi ICMI dengan mengusulkan agar orientasi pada nilai kerakyatan lebih diprioritaskan. A. Makmur Makka, *Loc. Cit*, hlm. 118

³¹ Ulil Abshar Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan; Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. II, 2000, hlm. 160

ICMI umumnya hanyalah ‘ornamen penghijau’ orang-orang yang rela atau terpaksa ikut dalam format politik yang ada, atau yang akan dijadikan penangkal terdepan. Satu-satunya keuntungan umat Islam dalam ICMI, bahwa ketika terjadi suksesi maka mereka sudah berada di jalur negara atau sudah membalikkan citra antagonisnya selama ini.³²

Pada muktamar III ICMI tanggal 9-12 Nopember 2000, ICMI sebagai organisasi sosial kebudayaan yang bergerak dalam bidang keagamaan, melakukan pembaharuan prinsip dengan merubah azas yang semula Pancasila menjadi berasaskan Islam, sebagai dasar dan perjuangannya.³³ Namun, timbul pemikiran yang bernada pesimis terhadap masa depan ICMI. Misalnya timbul pendapat yang menganggap bahwa peran ICMI sudah kehilangan gregetnya setelah B.J. Habibie tidak lagi berada dipuncak kekuasaannya. Hal ini disebabkan karena ICMI identik dengan B.J. Habibie.³⁴

Menurut Adi Sasono mengatakan, ICMI tidak bisa dipaksakan untuk selalu pro terhadap pemerintah, dan tidak akan pernah menjadi oposan, karena ICMI bukanlah partai politik. Lebih lanjut Adi Sasono mengatakan, tugas cendekiawan itu adalah mengakomodasi kebijaksanaan publik merupakan akar masalah terjadinya berbagai persoalan yang dihadapi saat ini. Karena itu, penilaian bahwa Cendekiawan tidak boleh berpolitik adalah keliru.³⁵ Tanpa disadari, ICMI juga menjadi mesin politik yang ampuh, atau bisa juga dicatat

³² Eko prasetyo, *Loc..Cit*, hlm. 87

³³ Pasal 4 Bab II Anggaran Dasar ICMI, Hasil Muktamar III ICMI tahun 2000 di Kota Makassar.

³⁴ *Republika, Demi Umat, ICMI takkan Tinggalkan Wacana Politik*, Ahad 5 Nopember 2000, hlm. 1 dan 3

³⁵ Adi Sasono, Wawancara pada tanggal 5 September 2006 Di IAIN Walisongo Semarang.

bahwa ICMI seolah-olah telah berubah menjadi sebuah “*pseudo political party*” yang memetamorfosis, menjadi sebuah mesin politik.³⁶

ICMI, menurut B.J. Habibie, Ketua Dewan Kehormatan ICMI itu, harus berada di atas semua gerakan politik, untuk memberikan pesan moral dan etika kepada elite politik. Dia berulang kali mengingatkan semua jajaran pimpinan ICMI untuk menjaga independensinya pada Pemilu. "Kami tidak menampik atau menerima nama-nama calon pemimpin yang telah beredar dalam perkembangan selama ini. Banyak yang masih merupakan spekulasi. Tetapi ICMI akan menunggu hasil pemilu yang akan datang. Meskipun demikian, ICMI telah mengadakan pendekatan dan akan terus mengintensifkan pembicaraan antara ICMI dengan partai dan ormas Islam untuk mempermudah," ujar Pejabat Ketua Umum ICMI Achmad Tirtosudiro, saat menyampaikan hasil komisi politik ICMI di Jakarta.³⁷

Pokok pikiran komisi politik yang dilaksanakan pada tanggal 12-14 Maret 1999 itu juga menyebutkan, ICMI akan menempatkan diri sebagai perekat yang mempunyai jarak sama di antara partai-partai Islam dan berorientasi Islam dan dapat pula membuat strategi kerja sama dengan mereka. Selain itu, ICMI dan partai politik Islam yang berorientasi Islam tersebut perlu mengantisipasi pengamanannya pemilu mendatang dari upaya-upaya kegagalan oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki terselenggaranya pemilu.³⁸

³⁶ Tedi Kholiludin, *Loc.Cit*, hlm. 20

³⁷ Kompas, Komisi Politik ICMI: *Pemimpin Partai Islam Jangan Saling Hujat*, Senin, 15 Maret 1999.

³⁸ *Ibid.*

ICMI juga menantang capres dan cawapres pada Pemilu 2004 untuk membuat kontrak sosial dan kontrak politik dengan masyarakat. Dengan adanya kontrak sosial dan politik ini, semua janji yang diumbar pada saat kampanye nanti dapat dimintai pertanggungjawabannya. "Kalau enggak ada kontrak politik, lalu mereka hanya bikin visi misi dua lembar, bagaimana dapat menuntut mereka," kata Ketua Umum ICMI, Muslimin Nasution.³⁹

Berkaitan dengan adanya sejumlah fungsionaris ICMI di sejumlah partai politik (Amin Rais di PAN, Yusril Ihza Mahendra di PBB, Marwah Daud Ibrahim di Partai Golkar, Soegiharto di PKB, Salahudin Wahid di PKB, Hidayat Nur Wahid di PKS, Adi Sasono di Partai Merdeka, dan lain-lain) B.J. Habibie mengatakan, semua pihak harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan hak individu. Dalam konteks itulah dia berharap kehadiran fungsionaris ICMI di parpol dapat memperjuangkan iman dan takwa. Namun dia mengingatkan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) ICMI, semua fungsionaris yang terlibat dalam parpol harus nonaktif dari ICMI. B.J. Habibie lantas mencontohkan langkah Adi Sasono yang mundur dari jabatan Ketua Umum ICMI karena mendirikan dan memimpin Partai Merdeka.⁴⁰ "Intinya, fungsionaris ICMI harus bebas dari

³⁹ Pikiran Rakyat, *ICMI Minta Capres Buat Kontrak Politik*, Senin, 31 Mei 2004.

⁴⁰ Pengunduran Adi Sasono diri dari jabatan Ketua Umum ICMI, berdasarkan atas ijtihad politiknya mendirikan Partai Merdeka dilandasi oleh keinginan membangun kekuatan politik yang berpihak kepada rakyat. "Saya ingin membangun kekuatan rakyat dengan tiga prinsip, yaitu kebangsaan, kerakyatan, dan kemandirian," katanya dalam jumpa pers di Kantor ICMI Pusat Jakarta. Adi Sasono menambahkan, dirinya mengundurkan diri dari jabatannya di ICMI karena sebagai anggota menginginkan ICMI tetap memelihara independensinya. Majalah GATRA, *Parpol Baru; Adi Sasono Dirikan Partai Merdeka*, Jakarta, 27 Januari 2003. <http://www.gatra.com>

orang-orang parpol.⁴¹ Karena nanti dia tidak bisa melaksanakan tugas di ICMI secara optimal," tegasnya.⁴² Prof Dr Jimly Ashidique berharap agar ICMI benar-benar berfungsi sebagai wadah perekat umat Islam. Para cendekiawan muslim yang tersebar di berbagai partai politik hendaknya tetap bersatu. "Biarlah baju politiknya berlainan namun mereka harus tetap bersatu dalam ICMI," tambahnya.⁴³

Amin Rais dari kalangan dalam ICMI juga mengakuinya, "walaupun ICMI bukan organisasi politik dan tidak berpolitik praktis, saya yakin ICMI mempunyai *political leverage* (pengaruh politik) yang yang besar. Sejalan dengan pendapatnya, Adi Sasono mengatakan, ICMI tidak boleh buta politik.⁴⁴

Pernyataan Adi Sasono diperkuat oleh Prof. Dr. Dawam Rahardjo, yang mengatakan bahwa ICMI tidak akan sekali-kali meninggalkan wacana politik, sebab umat Islam nanti akan kembali dipinggirkan, meski ICMI tidak akan membentuk partai politik Islam, tetap ICMI akan mendukung partai politik Islam yang ada dan mendukung calon presiden dimasa mendatang.⁴⁵

Dalam konteks realisme politik 1990-an, ICMI dipandang Nurcholis Madjid sebagai "pendahuluan bagi keseimbangan baru Indonesia". Dengan melihat ICMI secara politik, Nurcholis Madjid berharap akan peranan ICMI

⁴¹ Kendati demikian, kembali ke `khittah` bukan berarti kader ICMI tidak boleh berpolitik. Silakan saja kalau mereka hendak bergabung dengan Parpol manapun, tetapi jangan membawa-bawa nama ICMI," Demikian dikatakan Sofjan S. Siregar (Ketua ICMI Orwil Eropa), se usai acara penutupan Raker ICMI Orwil Eropa di Brussel. Majalah GATRA, *ICMI Diminta tidak Berubah jadi Parpol*, Brussel, 12 November 2001, <http://www.gatra.com>

⁴² Suara Merdeka, *ICMI; Tak Mau Berpolitik Lagi*, Minggu, 14 Desember 2003

⁴³ Kompas, *Peran Politik ICMI Surut*, Senin, 12 Februari 2001

⁴⁴ Abdul Aziz Thaba, *Loc.Cit*, hlm. 292

⁴⁵ Republika, Ahad, 5 Nopember 2000, *Loc.Cit*, hlm. 3

sebagai sebuah langkah politik tak langsung “keseimbangan baru” dipandang sebagai proses yang menjadikan proses sosial-politik Indonesia berjalan secara relatif normal. Dalam arti tidak normal “kekuatan politik Islam“ berposisi dipinggirkan. ICMI diharapkan akan tampil menjadi ujung tombak pertumbuhan, perkembangan dan perubahan sosial Indonesia yang paling positif. Sebaliknya jika ICMI terlalu berorientasi politik dan kekuasaan jangka pendek tugas ideal itu akan gagal ditanganinya.⁴⁶

Dimasa yang akan datang, agar ICMI dapat bertahan dan semakin meningkat perlu memperhatikan beberapa hal berikut :⁴⁷

1. ICMI sebaiknya tetap tampil sebagai gerakan kultural dengan tidak meninggalkan wacana politik. Ini tidak berarti bahwa ICMI lantas a-politik, tetapi politik yang dikembangkannya adalah politik alokatif.⁴⁸
2. ICMI perlu melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan organisasi Islam atau kelompok-kelompok non-muslim.
3. Program dan agenda ICMI memihak hajat hidup golongan kecil dan memperluas basis sosial dukungan kalangan akar rumput.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ryamizard Riyacudu dalam acara pelantikan pengurus Orwil ICMI Jawa Tengah, di Semarang, Selasa 19 September 2006 mengatakan, ICMI juga harus mampu

⁴⁶ Muhammad Hari Zamhari, *agama dan negara; analisis kritis pemikiran politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2004, hlm. 218

⁴⁷ Hari Sucipto, *ICMI Demokrasi dan Nasib Umat*, Republika, Ahad 5 Nopember 2000, hlm. 8

⁴⁸ Politik alokatif yakni politik yang substansi nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan dalam arti luas. Politik alokatif juga mengembangkan pemikiran dan orientasi politik yang menekankan substansi dari nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik. Agar politik alokatif dapat dikembangkan dengan baik oleh ICMI, harus ditunjang oleh inklusifisme pemikiran dan wawasan politik yang mengarah pada penampilan simbol-simbol politik yang terbuka, dimengerti dan diterima baik oleh kalangan sendiri maupun luar. Fahamsyah Teja Yuhana, *Loc.Cit*, hlm. 69

menjadi gerakan politik negara, yakni menjadikan NKRI tidak terpecah belah karena adanya perbedaan. Namun, sebaliknya ICMI harus bisa menjadikan bangsa menjadi kuat, utuh, berdaulat, adil, dan makmur. Menurut dia, ICMI tidak boleh terpecah dan terlibat dalam politik praktis demi kepentingan sesaat. Kader ICMI dapat aktif di partai apa pun, namun, jika tujuan kebijakan partai menyimpang dari komitmen atau tidak memihak rakyat, maka kader ICMI wajib mengkritisi secara elegan.⁴⁹

Ditengah berbagai kecurigaan politik atas ICMI, ternyata masih ada pengamat asing yang melihat lahirnya ICMI dari perspektif yang lebih positif, atau setidaknya berpijak pada posisi netral, seperti Robert W. Hefner. Menurut antropolog ini, lahirnya ICMI adalah cermin dari bangkitnya kelas menengah muslim baru. Yakni sebuah lapisan umat Islam yang mempunyai komitmen tinggi pada semangat intelektualisme dan profesionalisme dalam berbagai lapangan kehidupan. ICMI sebagai representasi kelas menengah muslim baru, punya posisi strategis untuk menjadi kekuatan pencerahan dan integrasi umat.⁵⁰

Kalau ICMI ingin tetap konsisten dengan apa yang pernah dilontarkan oleh Edward Said bahwa peran cendekiawan adalah menolak bekerja sama dengan kekuatan yang masih sebagai biang penderitaan rakyat, maka akan lebih tepat jika ICMI memikirkan kembali tentang kehadirannya di tengah masyarakat. Tak hanya itu, ICMI juga harus menata lagi relasi yang dibangun dengan organ-organ lain termasuk dengan pemerintah. Pendek kata, persoalan

⁴⁹ H.U. Suara Merdeka, Selasa 19 September 2006, hlm. 9

⁵⁰ A. Makmur Makka, *Loc. Cit*, hlm. 43

tentang revitalisasi peran ICMI menjadi agenda mahapenting bagi sinergitas gerakan ICMI kedepan.⁵¹

Kehadiran ICMI jelas merupakan respon atas situasi konkret, dimana masyarakat menginginkan tampilnya peran cendekiawan untuk pencerahan dan penyampaian pesan Islam sebagai *rahmatan lil'alam*. Sebagai wadah berhimpunnya berbagai kelompok, profesi dan aliran, ICMI mampu menggalang potensi ummat Islam untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Menatap tantangan masa depan umat Islam di era Indonesia Baru, ICMI perlu merapatkan barisan kalau menghendaki kehadirannya tetap relevan dalam kehidupan nasional menyongsong situasi yang baru sama sekali. Yang lebih penting, bagaimana organisasi cendekiawan Muslim ini menatap masa depan di tengah perubahan konstelasi sosial, ekonomi, politik, budaya di tanah air sekarang.

Melalui peran seperti itu, ICMI diharapkan akan mampu mewujudkan integrasi politik dan sosial kultural antara ummat Islam dan negara. Sebagai golongan mayoritas dalam entitas negara-bangsa Indonesia, ummat Islam sudah selayaknya mendapat tempat yang proporsional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tanpa menegasikan kepentingan golongan minoritas.⁵²

⁵¹ Tedi Kholiludin, *Loc.Cit*, hlm. 20

⁵² A. Makmur Makka, *Loc. Cit*, hlm. 44

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar, *Membakar Rumah Tuhan; Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. II, 2000
- Haryono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998,
- Hikam, Muhammad A.S., *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1999
- H.U. Suara Merdeka, *ICMI; Tak Mau Berpolitik Lagi*, Minggu, 14 Desember 2003
- H.U. Suara Merdeka, Selasa 19 September 2006
- Kuntowijoyo, *Agenda Umat Islam Era Reformasi*, Bandung: Mizan, 1999
- Kompas, *Rhoma Irama, Masuk Golkar karena "Lillahi Ta'ala"*, Jakarta, 29 April 1997
- Kompas, *Komisi Politik ICMI: Pemimpin Partai Islam Jangan Saling Hujat*, Senin, 15 Maret 1999.
- Kompas, *Peran Politik ICMI Surut*, Senin, 12 Februari 2001
- Majalah GATRA, *ICMI Diminta tidak Berubah jadi Parpol*, Brussel, 12 November 2001, <http://www.gatra.com>.
- Majalah GATRA, *Parpol Baru; Adi Sasono Dirikan Partai Merdeka*, Jakarta, 27 Januari 2003. <http://www.gatra.com>.
- Majalah SANTRI, *Merenungkan Gagasan Negara Islam*, Surabaya, Nopember 1997.
- Majalah UMMAT: No. 5/ Thn C/ 4 September 1995 – 8 Rabiul Akhir 1416 H

Pikiran Rakyat, *ICMI Minta Capres Buat Kontrak Politik*, Senin, 31 Mei 2004.

Prasetyo, Eko, *Membela Agama Tuhan; Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, Jogjakarta: INSIST Press, 2002

Pieris, John, *Tragedi Maluku; Sebuah Krisis peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004

Republika, *Demi Umat, ICMI takkan Tinggalkan Wacana Politik*, Ahad 5 Nopember 2000

Saefuddin, A.M., *Ijihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996.

Zamhari, Muhammad Hari, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2004

www.icmi.or.id, Rabu, 30 Nopember 2005

selesai ah.....!

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan, banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Namun, setidaknya penulis mencatat beberapa point penting yang menjadi inti dari bahasan **Gerakan Politik ICMI pada Era Reformasi (1998 – 2005)**, yaitu :

1. ICMI lahir dari kaum santri modern perkotaan yang membutuhkan wadah dan keseimbangan baru dengan Islam, akibat Islam dipinggirkan dan umat Islam dinista pada era Orde Baru, yang bertujuan membangun bangsa yang bermartabat dan mandiri. Maka yang mendahului kelahiran ICMI adalah perjalanan panjang umat Islam ditengah ‘badai politik’ yang tidak menginginkan ekistensi ‘Islam politik’. Melalui wadah ICMI berbagai potensi Islam dipersatukan, timbul kesadaran saling berakomodasi antara berbagai ‘pusat sumber kekuasaan’ cendekiawan muslim.
2. Lahirnya ICMI adalah salah satu corak pengejawantahan kebangkitan kembali Islam Indonesia. Ini bisa disebut sebagai satu proses alamiah bagi setiap komunitas yang ingin mempertahankan dan menjaga kelangsungan hidupnya. Kebangkitan agama itu secara mencolok juga ditandai dengan tampilnya Islam sebagai "ideologi peradaban" dunia dan kekuatan alternatif bagi perkembangan peradaban dunia. Bagi Barat, kebangkitan

Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka menjadi terancam.

3. Jika "terpaksa" ICMI harus bermain di ranah politik, maka yang perlu dimainkan adalah membangun kesadaran berpolitik masyarakat untuk menentukan pilihannya sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Allah. ICMI justru harus berada di atas semua gerakan politik, untuk memberikan pesan moral dan etika kepada elit politik. Kader-kader ICMI memiliki hak dan kewajiban untuk terjun ke kancah politik dalam rangka pergulatan penyusunan kebijakan publik.

B. Saran – Saran

Tidaklah dapat dipungkiri, bahwa ICMI memiliki peran besar dalam dinamika politik Islam di Indonesia dan pembangunan bangsa di bidang agama, sosial, politik, pendidikan dan pemberdayaan *civil society* di Indonesia. Namun ke depan organisasi ICMI tidak lagi terjebak dalam politik praktis yang dapat merugikan kepentingan umat.

Sebagai saran yang dianggap penting penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, dalam perpolitikan hendaknya tidak menjadikan agama sebagai jembatan untuk mencapai kekuasaan tetapi dengan profesionalisme dan proporsional.
2. Bagi pemerintah hendaknya mengakomodasi kepentingan umat Islam bukan sekedar untuk melanggengkan kekuasaan.

3. Para cendekiawan dan ulama hendaknya benar-benar dapat menjadi panutan dan tuntunan pelita penerang bagi umatnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat, hidayah, inayah serta ridho-Nya, tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Karenanya dengan sangat menyadari, maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca menjadi harapan penulis. Sebagai puncak dari penutup ini tiada kata indah yang dapat penulis ungkapkan melainkan tiada usaha besar akan berhasil tanpa dimulai dari yang kecil. Semoga Allah SWT meridhoinya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rifa'I Hasan dan Amrullah Ahmad, *Perspektif Islam dalam Pembangunan Bangsa; Pertemuan Cendekiawan Muslim Pertama*, Jakarta; PLP2M, Cet. I, 1987.
- Al Barry, M. Dahlan Yacub, *Kamus Bahaasa Indoensia Kontemporer*, Surabaya: Arkola, 2001
- Abdalla, Ulil Abshar, *Membakar Rumah Tuhan; Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, Cet. II, 2000.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik; Perbandingan antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. II, 1997
- Azra, Azyumardi, "Fundamentalisme Partai Islam", dalam Hamid Basyaib dan Abidin, Hamid (ed.), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu '99 sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet, 2000
- Bahar, Ahmad, *Biografi Cendekiawan Politik; Amin Rais Gagasan dan Pemikiran Menggapai Masa Depan Indonesia Baru*, Yogyakarta: Pena Cendekia, 1998
- _____, *ICMI ; Kekuasaan dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pena Cendekia, Cet I, 1995
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir Maudhu'i; Solusi Qur'ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.I, 2001,
- Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1985
- Chris & Peter Van Dierman, *Indonesia Di Tengah Transisi: Aspek-Aspek Sosial dari Reformasi dan Krisis*, Terj. Landung S, Y Heryanto, Sujanti Marsudi, Yogyakarta: LkiS, 2000
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahaasa Indoensia*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Prospek Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998
- Ensiklopedi Islam, Penyusun Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1993

- Executive Summary* Program ICMI Organisasi Wilayah Jawa Tengah dengan Gubernur Jawa Tengah H. Mardiyanto, Semarang tanggal 2 Oktober 2006.
- Furqon, Muhammad Arif, *ICMI Masa Reformasi: Studi Kasus Respon Anggota – Anggota ICMI Surabaya terhadap Perubahan Politik Pasca Rezim Soeharto sampai dengan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid*, library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id; Post Graduate Airlangga University, 07 April 2004.
- Haryono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Hikam, Muhammad A.S., *Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society*, Jakarta: Erlangga, Cet. I, 2000.
- _____, *Politik Kewarganegaraan; Landasan Redemokratisasi Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, Cet. II, 1999
- H.U. Suara Merdeka, *ICMI; Tak Mau Berpolitik Lagi*, Minggu, 14 Desember 2003
- _____, Selasa 19 September 2006.
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000
- Karim, Thorik Solikul, *Polarisasi dan Politik Islam Indonesia (Artikel)*, Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 107/ Juni-Agustus 2006,
- Kholiludin, Tedi, *ICMI masihkan menjadi Intelektual Tukang ? (Artikel)*, Semarang: Surat Kabar Mahasiswa AMANAT, edisi 105/ Januari-Februari 2006
- Kompas, *Rhoma Irama, Masuk Golkar karena "Lillahi Ta'ala"*, Jakarta, 29 April 1997
- _____, *Komisi Politik ICMI: Pemimpin Partai Islam Jangan Saling Hujat*, Senin, 15 Maret 1999.
- _____, *Peran Politik ICMI Surut*, Senin, 12 Februari 2001.
- Kuntowijoyo, *Agenda Umat Islam Era Reformasi*, Bandung: Mizan, 1999

- Madjid, Nurcholis, *Islam dan Politik Modern*, <is-lam@isnet.org>, Rabu 10 Agustus 2000.
- Majalah GATRA, *ICMI Diminta tidak Berubah jadi Parpol*, Brussel, 12 November 2001, <http://www.gatra.com>.
- _____, *Parpol Baru; Adi Sasono Dirikan Partai Merdeka*, Jakarta, 27 Januari 2003. <http://www.gatra.com>.
- Majalah Ma'arif, Edisi 09/ IV/ Desember 2004-Maret 2005
- Majalah SANTRI, *Merenungkan Gagasan Negara Islam*, Surabaya, Nopember 1997.
- Majalah UMMAT: No. 5/ Thn C/ 4 September 1995 – 8 Rabiul Akhir 1416 H
- Makmur, A. Makka dan Dharorudin Mashad, *ICMI: Dinamika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996
- Mardjono, Hartono, *Politik Indonesia (1996-2003)*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. I, 1996
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Cet. II, 2003.
- Materi Dasar Nahdlatul Ulama *Ahlussunnah Waljamaah; Sejarah Perkembangan Islam Di Indonesia*, Semarang: PW. LP Ma'arif NU Jawa Tengah, 2002
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Cet VI, 1995.
- Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, “*Metodologi Penelitian Praktis*”, Yogyakarta : BP FE UGM, 1987
- Nawawi, Hasan, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Universty Press, Cet II, 1995
- Nurudin, *Ke Mana Bahtera ICMI Berlayar ?* (Artikel) H.U. Suara Merdeka, Selasa, 19 September 2006.
- Pieris, John, *Tragedi Maluku; Sebuah Krisis peradaban*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Cet. I, 2004
- Pikiran Rakyat, *ICMI Minta Capres Buat Kontrak Politik*, Senin, 31 Mei 2004.
- Prasetyo, Eko, *Membela Agama Tuhan; Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, Jogjakarta: INSIST Press, 2002.

- Putro, Mulyo, *Pendekatan Kualitatif dalam Aplikasi Lapangan*, Makalah :
Pelatihan Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Hukum dan Masyarakat,
Fakultas Hukum Undip, 1999
- Rahardjo, M. Dawam, *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa;
Risalah Cendekiawan Muslim*, Bandung; Mizan, Cet. IV, 1999.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal; Transmisi Revivalisme Islam
Timur Tengah Ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Rais, M. Amin, *Sikap Kami*, Surabaya: Pustaka Anda, Cet. I, 1999
- _____, *Menyelamatkan Agenda Reformasi* (artikel), dalam Lukman
Hakim, *Reformasi dalam Stagnasi*, Yayasan Al-Qur'an Mukmin, 2001
- Rais, Muhammad Dhiauddin, *Nazhariyyat as Siyasiyyah al Islamiyyah* (Teori
Politik Islam) Terj, <is-lam@isnet.org>, Thu, 10 Aug 2000.
Republika, 12 April 2000
- _____, *Demi Umat, ICMI takkan Tinggalkan Wacana Politik*, Ahad 5
Nopember 2000.
- Romdhon, dkk, *Agama-agama Besar di Dunia*, IAIN Sunan Kalijaga Press,
Yogyakarta
- Saefuddin, A.M., *Ijihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani
Press, Cet. I, 1996.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia; Kestabilan Peta Kekuatan Politik Dan
Pembangunan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. X, 2003
- Sasono, Adi, Wawancara pada tanggal 5 September 2006 Di IAIN Walisongo
Semarang.
- Sirozi, Muhammad, *Catatan Kritis Politik Islam Era Reformasi*, Yogyakarta: AK
Group, 2004.
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Perkembangan Politik*, Surabaya: Sinar
Wijaya, Cet. I, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :
Yudhistira, 1990.
- Suharnomo, (Sekertaris Umum ICMI Orwil Jawa Tengah) Wawancara pada
tanggal 20 Nopember 2006 di kantor ICMI Orwil Jawa Tengah.

- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam; Soekarni Versus Natsir*, Jakarta: Teraju, Cet. I, 2002.
- Swara Ditpertaiss: No. 14 Th. II, 31 Agustus 2004
- Teba, Sudirman, *Islam Menuju Era Reformasi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara; dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pres, Cet. I, 1996.
- Umam, Ahmad Khoirul, “*Korupsi dalam Spektrum Politik Kiai; Studi Kasus Nahdlotul Ulama di Jawa Tengah*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2005, td
- Wahid, Abdurrahman, *Birokratisasi Gerakan Islam* (Artikel), Kompas, 30 Agustus 2006.

Wirosardjono, Soetjipto, *Masih Relevankah ICMI ?* (Artikel), www.icmi.or.id,
Minggu, 02 Juli 2000.

www.habibiecenter.or.id, 18/ 12/ 2003

www.icmi.or.id, *Detik Detik Kelahiran ICMI*, Rabu 5 Mei 2004.

www.icmi.or.id, Rabu, 30 Nopember 2005

Yuhana, Fahamsyah Teja, *“Peran Politik ICMI dalam Dinamika Politik Islam
Pasca Orde Baru (Studi Analisis Terhadap Politik Ekonomi ICMI)”*
Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo, 2004, td

Zamhari, Muhammad Hari, *Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Politik
Nurcholis Madjid*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. I, 2004.

Alhamdulillah..... mohon pidu'ana.....!